



**ANALISIS PERUBAHAN TARIF PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPH
ORANG PRIBADI MELALUI PENDEKATAN TEORI
KURVA LAFFER STUDI PADA DJP
KANWIL JAWA TIMUR III
(TAHUN 2011-2013)**

SKRIPSI

Oleh :

Darwis Muhammad Ahrori

(100810101014)

**ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



**ANALISIS PERUBAHAN TARIF PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPH
ORANG PRIBADI MELALUI PENDEKATAN TEORI
KURVA LAFFER STUDI PADA DJP
KANWIL JAWA TIMUR III
(TAHUN 2011-2013)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

Darwis Muhammad Ahrori

(100810101014)

**ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2016

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan puji syukur yang tak terhingga pada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Umi Khumairoh dan Abi Ahmad Junaedi, yang tidak pernah menyerah memberikan dukungan dengan sepenuh hati;
2. Guru-guru sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

MOTTO

Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.

(QS. Asy-Syams: 8)

Segala sesuatu yang datang ke dalam kehidupan Anda ditarik oleh Anda ke dalam hidup Anda, dan segala sesuatu itu tertarik ke Anda oleh citra-citra yang Anda pelihara dalam benak.

(Prentice Mulford)

Orang bodoh yang manapun dapat mengkritik, mengutuk, dan mengeluh.

Kebanyakan orang bodoh melakukannya.

(Dale Carnegie)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darwis Muhammad Ahrori

NIM : 100810101014

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:”Analisis Perubahan Tarif Pajak Terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi Melalui Pendekatan Teori Kurva Laffer Studi Pada DJP Kanwil Jawa Timur III (Tahun 2011-2013)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Maret 2016

Yang menyatakan,

Darwis Muhammad Ahrori
NIM 100810101014

SKRIPSI

**ANALISIS PERUBAHAN TARIF PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPH
ORANG PRIBADI MELALUI PENDEKATAN TEORI
KURVA LAFFER STUDI PADA DJP
KANWIL JAWA TIMUR III
(TAHUN 2011-2013)**

Oleh
Darwis Muhammad Ahrori
NIM: 100810101014

Pembimbing

Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II

: Dr. Rafael Purtomo S., M.Si
: Dr. Herman Cahyo D., SE., MP

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Perubahan Tarif Pajak Terhadap Penerimaan Pph
Orang Pribadi Melalui Pendekatan Teori Kurva Laffer: Studi
Pada DJP Kanwil Jawa Timur III (Tahun 2011-2013)

Nama Mahasiswa : Darwis Muhammad Ahrori

NIM : 100810101014

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Regional

Tanggal Persetujuan :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rafael Purto S., M.Si
NIP. 1958 1024 1988 0310 01

Dr. Herman Cahyo D., SE., MP
NIP. 1972 0713 1999 031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindartin, SE., M.Si
NIP. 19641108 198902 2 001

PENGESAHAN**Judul Skripsi****ANALISIS PERUBAHAN TARIF PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPH
ORANG PRIBADI MELALUI PENDEKATAN TEORI KURVA LAFFER
STUDI PADA DJP KANWIL JAWA TIMUR III (TAHUN 2011-2013)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Darwis Muhammad Ahrori

NIM : 100810101014

Jurusan: Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

18 Maret 2016

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua: : Drs. Bajuri ME (.....)
NIP.1953 1225 1984 0310 02
2. Sekretaris : Fivien Muslihatinningsih S.E., M.Si. (.....)
NIP. 1983 0116 2008 1220 01
3. Anggota : Dr.Siswoyo Hari Santosa, SE., M.Si. (.....)
NIP. 1968 0715 1993 0310 01

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Foto 4 X 6

warna

Dr. M. Fathorrazi, SE., M.Si
NIP. 19630614 1 199002 1 001

Analisis Perubahan Tarif Pajak Terhadap Penerimaan PPh Orang Pribadi Melalui Pendekatan Teori Kurva Laffer Studi Pada DJP Kanwil Jawa Timur III (Tahun 2011-2013)

Darwis Muhammad Ahrori

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Paradigma pemotongan tarif yang dapat menstimulus penerimaan pajak menjadi topik yang banyak diperdebatkan oleh banyak ekonom di dunia, selain itu pemotongan tarif juga menjadi tren di banyak negara. Teori kurva Laffer merupakan teori tarif pajak yang paling populer dan banyak menuai perdebatan sejak Jude Wanniski memuat teori tersebut pada tahun 1978. Berdasarkan teori Kurva Laffer, tarif memiliki kurva melengkung dalam mempengaruhi penerimaan pajak sehingga ada satu level tarif yang dapat memaksimalkan penerimaan pajak. Reformasi perpajakan di Indonesia pada tahun 2008 yang memangkas tarif pajak terutama tarif PPh OP merupakan hal yang penting untuk diteliti karena kebijakan ini masih baru diterapkan. Fokus pada penelitian ini adalah meneliti pengaruh perubahan tarif terhadap penerimaan PPh OP di 10 kabupaten/kota yang berada dalam pengawas DJP Kanwil Jawa Timur III dengan pendekatan teori kurva laffer dan menggunakan data panel. Analisis regresi polinomial dipilih untuk mengetahui tarif untuk memaksimalkan penerimaan PPh OP. Estimasi model menggunakan metode OLS, FEM dan REM. Metode REM merupakan metode terbaik dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan tarif memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh OP di Jawa Timur. Tarif untuk memaksimalkan penerimaan PPh OP adalah 8,56%. Tarif maksimum ini lebih tinggi daripada tarif rata-rata di 10 kabupaten/kota dalam wilayah penelitian.

Kata kunci: kurva Laffer, regresi polinomial, REM, tarif maksimum

Analysis Change Tax Rates To Individual Income Tax Revenue Approach In Theory of The Laffer Curve Study in East Java Provincial Offices DGT III (Years 2011-2013)

Darwis Muhammad Ahrori

Development Economics Department, Faculty of Economics, University of Jember

ABSTRACT

Paradigm cutting rates to stimulate tax revenue became a topic of much debate by many economists in the world, in addition, the tariff cuts are also becoming a trend in many countries. The Laffer curve theory is the most popular theory of the tax rates and the most contentious since Jude Wanniski load the theory in 1978. Based on the theory of the Laffer curve, rates have curved trajectory in influencing tax revenues so that there is a level of rates to maximizes tax revenue. Tax reform in Indonesia in 2008 which slashed tax rates especially individual income tax rates are important to study because it is still new policy is applied. The focus of this research is to investigate the effect of changes in rates on individual income tax receipts in 10 districts / cities under the supervision of the Directorate General of Taxation Office of East Java III approach the Laffer curve theory and using panel data. Polynomial regression analysis chosen to know the rates to maximize individual income tax receipts. Estimation models using OLS, FEM and REM. REM method is the best method in this study. Results of the analysis showed that changes in rates have a significant influence on the individual income tax receipts in East Java. Rates for maximizing individual income tax receipts was 8.56%. The maximum tax rate is higher than average rates in 10 districts / cities in the study area.

Keywords: Laffer Curve, polynomial regression, REM, Maximum tax rate

RINGKASAN

Analisis Perubahan Tarif Pajak Terhadap Penerimaan Pph Orang Pribadi Melalui Pendekatan Teori Kurva Laffer: Studi Pada DJP Kanwil Jawa Timur III (Tahun 2011-2013): Darwis Muhammad Ahrori, 100810101014; 2016; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Pentingnya pajak yang merupakan penyumbang terbesar penerimaan pemerintah tiap tahunnya membuat peraturan pemerintah yang berkenaan dengan tarif pajak menjadi krusial sehingga perubahan kebijakan tarif pajak sangat mempengaruhi penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Kebijakan pemotongan tarif pajak merupakan salah satu isu yang sering dibahas di banyak negara, tercatat beberapa negara pernah melakukan pemotongan tarif pajak termasuk beberapa negara di Asia tenggara termasuk Indonesia.

Pada dasarnya pengaruh yang timbul akibat perubahan tarif PPh orang pribadi (OP) pada perekonomian suatu negara, tergantung dari seberapa besar kemampuan pemerintah memaksimalkan penerimaan pajak dan seberapa besar perubahan konsumsi masyarakat setelah pendapatan individu dikurangi tarif PPh OP. Menurut Laffer (1981) jika pemerintah tidak dapat memproduksi barang dan jasa yang lebih bernilai (seperti perbaikan sistem pemerintahan, dan pengadaan barang publik) dari sebelum tarif pajak dinaikan, maka naiknya tarif tersebut tidak memberikan dampak positif bagi perekonomian negara tersebut. Begitu pula jika pemotongan tarif pajak tidak dapat meningkatkan konsumsi masyarakat, maka kebijakan tersebut juga tidak akan memberi dampak positif bagi perekonomian.

Teori Kurva Laffer menjelaskan hubungan yang lebih spesifik mengenai hubungan antara tarif dan penerimaan pajak. Teori ini pertama kali muncul dalam artikel yang ditulis oleh Jude Wanniski (1987). Menurut Laffer, dalam perspektif ekonomi turunya tarif pajak juga akan diikuti dengan meningkatnya produktifitas dan juga jumlah tenaga kerja sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi sehingga pada

akhirnya meningkatkan penerimaan pajak, pemangkasan tarif pajak juga dapat menurunkan angka penggelapan pajak dan pemalsuan data laporan keuangan.

Poin terpenting dalam teori Kurva Laffer adalah Selalu ada dua level tarif pajak yang menghasilkan penerimaan pajak yang sama, di mana pada saat tarif pajak berada di kedua titik ekstrim (0 dan 100), penerimaan pajak sama dengan nol. Pada titik ekstrim 0%, penerimaan pemerintah dari pajak adalah nol, karena tidak ada masyarakat yang terbebani oleh pajak, begitu pula titik ekstrim 100%. Akan tetapi, ada satu level tarif yang mampu memaksimalkan penerimaan pajak.

Pada tanggal 01 januari 2009 undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008 mulai diaktifkan. Poin terpenting dari undang-undang PPh 2008 adalah penurunan tarif pajak penghasilan orang pribadi, badan serta unit usaha. Dengan kebijakan tarif pajak yang baru, pemerintah mengharapkan kenaikan penerimaan pajak yang lebih besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh perubahan tarif terhadap penerimaan PPh OP setelah pemerintah memberlakukan kebijakan tarif yang lebih rendah.

Penelitian ini dilakukan di 10 kabupaten/kota di bawah pengawasan DJP Kanwil Jatim III dengan rentang waktu tahun 2011-2013. Model analisis regresi polinomial derajat kedua berfungsi untuk mengetahui tarif yang dapat memaksimalkan penerimaan PPh OP. Pengestimasi model menggunakan metode OLS, FEM, dan REM. Uji kelayakan model menunjukkan bahwa REM merupakan metode terbaik dalam penelitian ini. Tarif untuk memaksimalkan penerimaan PPh OP adalah 8,56%. Tarif ini lebih tinggi daripada tarif rata-rata dalam sampel penelitian meskipun tarif rata-rata di Kabupaten Malang pada tahun 2011 lebih tinggi daripada tarif maksimum. Mengacu pada nilai koefisien determinasi REM dan pada penelitian sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa masih banyak faktor selain tarif yang mempengaruhi penerimaan pajak sehingga pemerintah harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia, khususnya DJP Kanwil Jatim III.

PRAKATA

Dengan Menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan banyak rahmat selama ini bagi penulis, serta solawat dan salam semoga tetap tercurahkan bagi Rosul Muhammad SAW, yang telah memberikan pencerahan bagi seluruh umat manusia sampai hari akhir. Berbagai ujian dan cobaan yang telah dilalui dengan bekal kesabaran, tanggungjawab dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Penerimaan PPh Orang Pribadi Melalui Pendekatan Teori Kurva Laffer Studi Pada DJP Kanwil Jawa Timur III (Tahun 2011-2013). Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat terakhir untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, tenaga, pikiran, materi, dan saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rafael Purtomo Somaji M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia dan memberi kesempatan membimbing penulis dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan ketulusan dalam menyusun skripsi ini;
2. Bapak Dr. Herman Cahyo D., SE., MP selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan masukan dengan sudut pandang yang berbeda sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar ;
3. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jember;
4. Bapak Prof. Muhammad Saleh selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Jember serta Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Perpustakaan Pusat;

6. Umi Khumairoh dan Abi Ahmad Junaedi yang selalu bersabar, optimis dan tetap percaya serta memberikan doa selama ini. Keluarga Besar Bani Slamet dan Bani Komaruddin yang selalu memberikan motivasi selama ini;
7. Bapak Nanang di DJP Kanwil Jatim III bidang DP3 yang ramah dan selalu membantu penulis untuk melengkapi data pada penelitian ini;
8. Saudara angkatku tersayang Dedy, Yuda, Yono, Irwan, Wiko, Fuad, Fendi, Ponco, Enik, Wiwin, Niko, Imron, Alif, terima kasih untuk semua cerita dan kenangan bersama, baik canda tawa dan bantuan materi. Saudara Agus Ferdianto dan Malik yang selalu memberikan kontribusi tanpa penulis sadari;
9. Seluruh teman-teman di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala hal yang telah terjadi;
10. Indana Zulfa Izza Fahmi Amd. Keb. sebagai sahabat yang selalu menampung segala keluh kesah penulis dan selalu memberi dukungan serta dorongan agar penulis tidak menyerah untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Mas Puji, Mbak Ani, Mbak Yul dan suami serta bapak Haji yang selalu berbagi kebaikan selama penulis mengontrak rumah di Dusun Karang tengah Sumber Sari;
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna didunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini.

Jember, 12 Juni 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	vi
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1.PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat penelitian	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Teoritis	10
2.1.1 Pajak	10
1. Fungsi dan prinsip keadilan dari sistem perpajakan.....	10
2. Tarif Pajak Penghasilan.....	12

2.1.2 Pajak Penghasilan di Indonesia	13
1. Definisi PPh menurut UU PPh No 36/2008	13
2. Perbedaan UU PPh No 17/2000 dengan UU PPh No 36 . /2008	15
2.1.3 Teori Kurva Laffer	17
2.2 Tinjauan Empiris	19
2.3 Kerangka Konseptual	23
2.4 Hipotesis Penelitian	25
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	26
3.1 Jenis dan Sumber Data	26
3.2 Metode Analisis	27
3.2.1 Analisis Data.....	28
1. Model Pendekatan OLS	28
2. Pendekatan <i>Fixed Effect Model</i> (REM)	29
3. Pendekatan <i>Random Effect Model</i> (REM)	29
4. <i>Tax rate for maximum revenue</i>	30
5. Uji Kelayakan Model	30
6. Uji-F (Uji Simultan).....	31
7. Uji-t (Parsial).....	32
8. Koefisien determinasi berganda (R^2)	32
3.2.2 Uji asumsi klasik	33
3.3 Definisi Operasional.....	36
BAB 4. PEMBAHASAN	37
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian	37
4.2 Hasil Analisis Regresi Polinomial	37
4.2.1 Statistik Deskriptif.....	37
4.2.2 Hasil estimasi Regresi Polinomial derajat Ke-2.....	38
1. OLS (<i>Pooled Rgression</i>)	39
2. <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).....	39

3. <i>Random Effec Model (REM)</i>	41
4.2.3 Hasil Uji Kelayakan Model.....	43
4.2.3.1 Hasil Uji Chow	43
4.2.3.2 Hasil Uji Hausman.....	44
4.2.3.3 Hasil Uji Breusch-Pagan (LM).....	44
4.2.4 Tarif Pajak Maksimum.....	45
4.2.5 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	45
4.2.6 Hasil Uji Hipotesis	46
4.3 Pembahasan	48
4.3.1 Model regresi polinomial derajat kedua.....	48
4.3.2 Pengaruh perubahan tarif terhadap penerimaan PPh OP	50
4.3.3 Tarif untuk memaksimalkan penerimaan PPh OP.....	50
4.3.4 Model RE masing-masing kabupaten	52
BAB 5. PENENUTUP.....	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	58

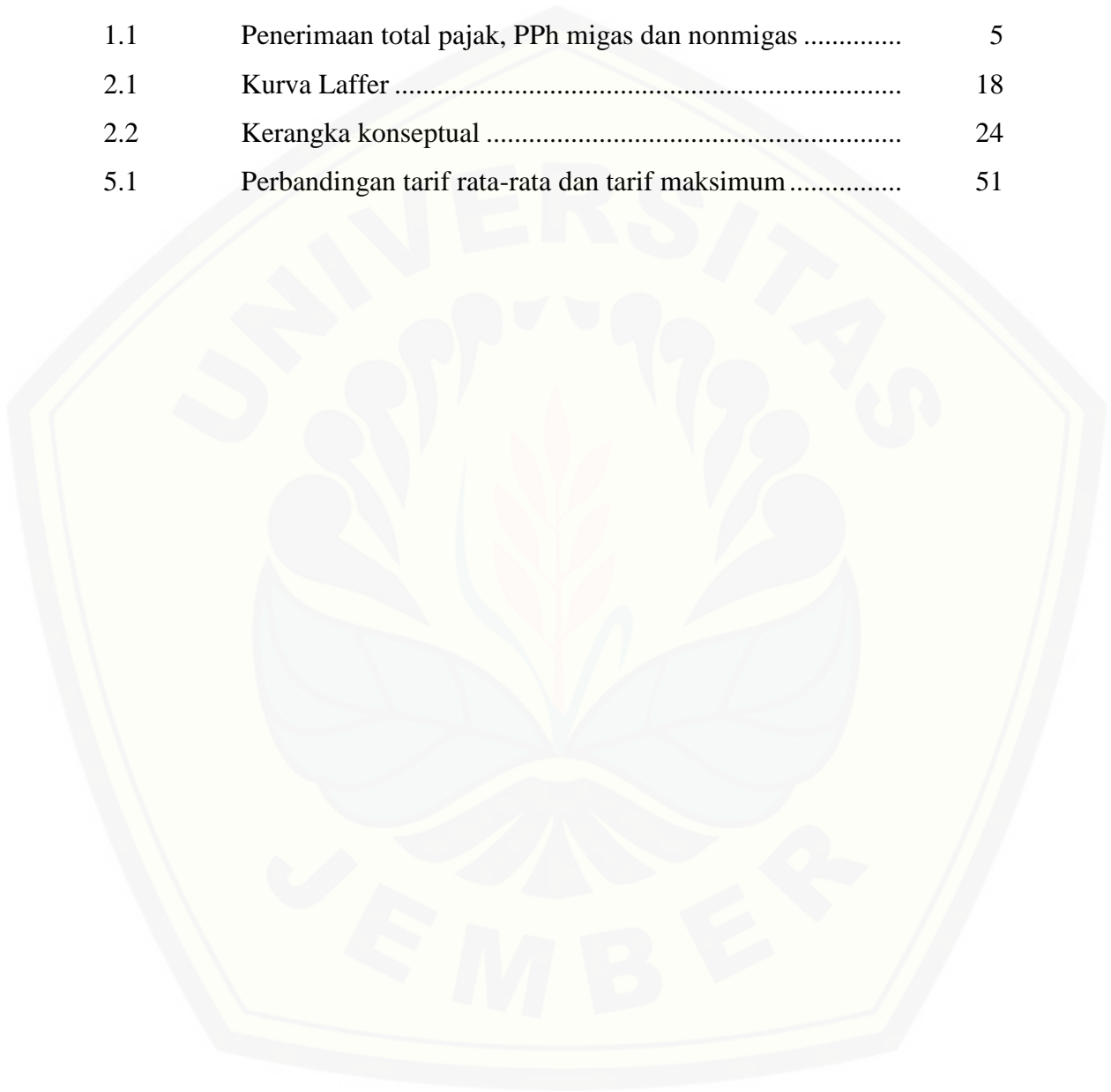
DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
1.1	Tarif PPh OP di Asia Tenggara	2
1.2	Penerimaan Pemerintah Pusat	4
1.3	Perbedaan tarif UU PPh OP Sebelum 2008 dan setelah 2008....	4
1.3	Penerimaan PPh OP di 10 Kabupaten/kota di Jawa Timur (juta rupiah).....	7
2.1	Penelitian Terdahulu	20
4.1	Statistik deskriptif masing-masing variabel	37
4.2	Hasil Estimasi OLS	39
4.3	Hasil Estimasi FEM.....	40
4.4	Koefisien <i>Fixed Effect</i>	40
4.5	Hasil Estimasi REM	41
4.6	Koefisien <i>Fixed Effect</i>	42
4.7	Perbandingan Hasil Estimasi	42
4.8	Hasil Uji Chow	43
4.9	Hasil Uji Hausman tes	44
4.10	Hasil Uji Breusch-Pagan (LM-test).....	44
4.11	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	46
4.12	Perkembangan Penerimaan PPh dan WPOP Aktif Kabupaten Kediri	53
4.13	Perkembangan Penerimaan PPh dan WPOP Aktif Kabupaten Pasuruan.....	54
4.14	Perkembangan Penerimaan PPh dan WPOP Aktif Kabupaten Probolinggo	55
4.15	Perkembangan Penerimaan PPh dan WPOP Aktif Kabupaten Jember.....	57

4.16	Perkembangan Penerimaan PPh dan WPOP Aktif Kabupaten Banyuwangi.....	58
4.17	Perkembangan Penerimaan PPh dan WPOP Aktif Kabupaten Kota Batu.....	58
4.18	Perkembangan Penerimaan PPh dan WPOP Aktif Kabupaten Tulungagung.....	59
4.19	Perkembangan Penerimaan PPh dan WPOP Aktif Kabupaten Situbondo.....	60
4.20	Perkembangan Penerimaan PPh dan WPOP Aktif Kabupaten Malang.....	61
4.21	Perkembangan Penerimaan PPh dan WPOP Aktif Kabupaten Blitar.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Halaman
1.1	Penerimaan total pajak, PPh migas dan nonmigas	5
2.1	Kurva Laffer	18
2.2	Kerangka konseptual	24
5.1	Perbandingan tarif rata-rata dan tarif maksimum	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Uraian	Halaman
A	Tabulasi Data.....	46
B	Hasil Analisis Deskriptif	47
C	Hasil Estimasi OLS (<i>Pooled Regression</i>).....	48
D	Hasil Estimasi FEM.....	49
E	Hasil Estimasi REM	50
F	Hasil Uji Chow (OLS Vs FEM)	51
G	Hasil Uji Hausman (FEM Vs REM).....	52
H	Hasil Uji Breusch-Pagan Lagrange Multiplier (OLS Vs REM).....	53
I	Uji Normalitas pada Estimasi OLS	54
J	Hasil Uji Normalitas pada Estimasi FEM	55
K	Hasil Uji Normalitas pada Estimasi REM.....	56
L	Hasil Uji Multikolinearitas	57
M	Surat Izin Penelitian dari DJP Kanwil Jatim III Malang.....	58



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Sebagian besar pendapatan tiap negara di seluruh dunia diperoleh dari sektor perpajakan. Pajak juga merupakan alat kebijakan fiskal yang berfungsi tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara tetapi juga sebagai pengatur perekonomian (Schiller, 2005:268).

Pentingnya pajak yang merupakan penyumbang terbesar penerimaan pemerintah tiap tahunnya membuat peraturan pemerintah yang berkenaan dengan tarif pajak menjadi krusial sehingga menaikkan atau menurunkan tarif pajak sangat mempengaruhi penerimaan pemerintah dari pajak. Kebijakan pemotongan tarif pajak pun merupakan salah satu isu yang sering dibahas di banyak negara. Tercatat beberapa negara pernah melakukan pemotongan tarif pajak seperti Amerika, Rusia, Rumania dan beberapa negara lainnya. Di Amerika, pemotongan tarif pajak terjadi tiga kali dalam satu dekade terakhir, yaitu pada tahun 1920, 1960 dan 1980 yang berdampak besar terhadap penerimaan pajak di Amerika (Laffer, 2004).

Pada tahun 2001, Rusia memberlakukan sistem baru dalam perpajakan, di mana tarif pajak yang diberlakukan adalah pajak tunggal. Sebelumnya, tarif pajak yang diberlakukan adalah 12, 20 dan 30% lalu kemudian diganti dengan tarif pajak tunggal sebesar 13%. Penerimaan dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH OP) Rusia pun mengalami peningkatan sebesar 46% pada tahun 2002 (Ivanova *et al*, 2005). Beberapa negara eropa seperti Estonia, Lithuania, Latvia, Slovakia, Romania, Bulgaria dan Republik Ceko juga melakukan kebijakan yang sama dengan Rusia dengan menerapkan sistem pajak tunggal dengan tarif yang lebih rendah dari sebelumnya (Kalchev, 2014).

Pemotongan tarif pajak juga terjadi di Belanda yang memangkas tarif PPH OP maksimum dari 60% menjadi 52% pada tahun 2001 sampai 2014. Di Swedia terjadi

sepuluh kali perubahan tarif PPh OP sejak tahun 1994 sampai 2014, pada tahun 1995 tarif PPh OP maksimum adalah 61,4% dan pada tahun 2000 sebesar 51,50%. Tarif PPh OP maksimum yang diberlakukan saat ini adalah 56,90%.

Selain beberapa negara tersebut, di Asia Tenggara juga terjadi tren pemotongan tarif pajak. Terdapat lima negara yang melakukan pemotongan tarif PPh OP dalam sepuluh tahun terakhir yang ditunjukkan dalam tabel dibawah ini. Tarif PPh OP yang ditunjukkan oleh tabel 1.1 adalah tarif progresif tertinggi di masing-masing negara.

Tabel 1.1 Tarif pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) di Asia Tenggara

Negara	Singapura	Vietnam	Malaysia	Laos	Thailand
Tahun					
2004	22%	40%	28%	25%	37%
2005	21%	40%	28%	25%	37%
2006	20%	40%	28%	25%	37%
2007	20%	40%	28%	25%	37%
2008	20%	40%	28%	25%	37%
2009	20%	35%	27%	25%	37%
2010	20%	35%	26%	25%	37%
2011	20%	35%	26%	28%	37%
2012	20%	35%	26%	28%	37%
2013	20%	35%	26%	24%	35%
2014	20%	35%	26%	24%	35%

Sumber : [Http://www.tradingeconomics.com](http://www.tradingeconomics.com)

Singapura merupakan negara pertama yang memotong tarif PPh OP pada tahun 2005 menjadi 21% dan dilanjutkan pada 2006 menjadi 20% sampai sekarang, lalu kemudian Vietnam dan Malaysia memotong tarif PPh OP pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 Malaysia kembali memotong tarif PPh OP di negaranya. Thailand

memotong tarif PPh OP pada tahun 2013 dari 37% menjadi 35%. Berbeda dengan keempat negara tersebut, Vietnam sempat menaikkan tarif ditahun 2011 lalu kemudian memotong tarif tersebut menjadi 35% di tahun 2013 sampai sekarang.

Pada dasarnya pengaruh yang timbul akibat perubahan tarif PPh OP pada perekonomian suatu negara, tergantung dari seberapa besar kemampuan pemerintah memaksimalkan penerimaan pajak dan seberapa besar perubahan konsumsi masyarakat setelah pendapatan individu dikurangi tarif PPh OP. Menurut Laffer (1981) jika pemerintah tidak dapat memproduksi barang dan jasa yang lebih bernilai (seperti perbaikan sistem pemerintahan, dan pengadaan barang publik) dari sebelum tarif pajak dinaikan, maka naiknya tarif tersebut tidak memberikan dampak positif bagi perekonomian negara tersebut. Begitu pula jika pemotongan tarif pajak tidak dapat meningkatkan konsumsi masyarakat, maka kebijakan tersebut juga tidak akan memberi dampak positif bagi perekonomian.

Penelitian yang dilakukan oleh Hsing (1996) di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa pemotongan tarif pajak di tahun 1980 memberikan dampak negatif bagi AS. Penerimaan dari sektor pajak berkurang sehingga pendapatan pemerintah mengalami defisit. Laffer (2004) menegaskan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebelum kebijakan pemotongan tarif pajak diberlakukan di suatu negara (Penjelasan yang lebih detail akan dibahas di bab dua).

Penerimaan dari perpajakan di Indonesia sama halnya dengan di negara lain, di mana penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi pemerintah untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Sehingga jika ada pembaharuan kebijakan perpajakan, maka secara otomatis akan mempengaruhi penerimaan pemerintah. Penerimaan pajak diperoleh dari berbagai aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat baik yang berkewarga negaraan Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan kegiatan di Indonesia. Secara garis besar, penerimaan perpajakan menurut susunan APBN Indonesia dibagi menjadi enam yaitu penerimaan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai dan penjualan barang mewah (PPNBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), cukai, pajak lainnya dan pajak perdagangan

internasional. Dari keenam sumber pajak tersebut, pajak penghasilan memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan pemerintah baik penghasilan migas maupun penghasilan non migas.

Tabel 1.2 Penerimaan pemerintah pusat

Penerimaan Pemerintah Pusat		Kontribusi Total Pajak	Kontribusi PPh nonmigas	Kontribusi PPh migas
Tahun	(Triliun Rupiah)	(%)	(%)	(%)
2008	981,6	67,10473	25,51752	7,85617
2009	848,77	73,03745	31,52444	5,89594
2010	955,27	75,71681	31,21316	6,16286
2011	1210,58	72,18606	29,57508	6,03801
2012	1338,32	73,26499	28,51411	6,23617
2013	1438,89	71,57253	28,75828	6,16774

Sumber : LKPP tahun 2009-2013.

Tabel 1.3 memperlihatkan kontribusi penerimaan total dari pajak bagi penerimaan pemerintah. Dari tabel diatas kita dapat melihat bahwa penerimaan pajak memberikan kontribusi lebih dari 60% dan penerimaan PPh memberikan kontribusi lebih dari 25% tiap tahunnya bagi pendapatan total pemerintah pusat. Penerimaan PPh nonmigas memberikan kontribusi yang lebih kecil bagi penerimaan pemerintah pusat jika dibandingkan dengan penerimaan PPh nonmigas.

Pada tanggal 01 januari 2009 undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008 mulai diaktifkan. Poin terpenting dari undang-undang PPh 2008 adalah penurunan tarif pajak penghasilan orang pribadi, badan serta unit usaha. Dengan kebijakan tarif pajak yang baru, pemerintah mengharapkan kenaikan penerimaan pajak yang lebih besar.

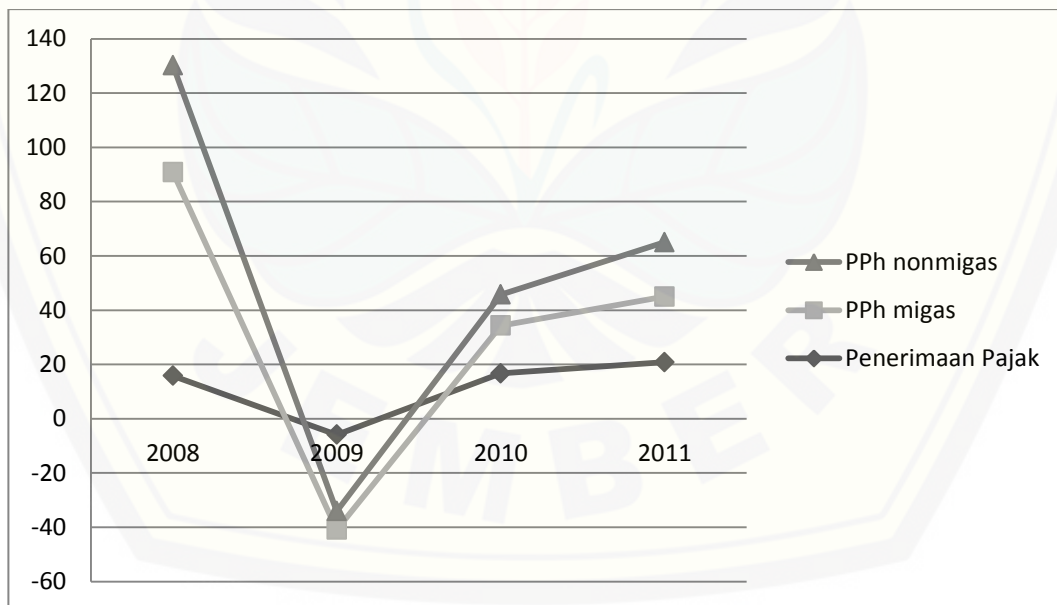
Tabel 1.3 Perbedaan tarif UU PPh OP Sebelum 2008 dan setelah 2008

Sampai dengan tahun pajak 2008	Tarif	Tahun pajak 2009	Tarif
<Rp 25 juta	5%	<Rp 50.juta	5%
Rp 25 juta – Rp 50 juta	10%	Rp 50 juta – Rp 250 juta	15%
Rp 50 juta– Rp 100 juta	15%	Rp 250 juta – Rp 500 juta	25%
Rp 100 juta – Rp 200 juta	25%	>Rp 500 juta	30%
>Rp 200 juta	35%		

Sumber : Hartini (2009)

Tabel di atas menunjukkan perubahan tarif pajak penghasilan orang pribadi setelah diberlakukannya undang undang PPh No. 36 tahun 2008. Penurunan tarif pajak ini menurut Darmin Nasution (dalam Hartini, 2009) mampu menaikkan penerimaan pajak karena meningkatnya kepatuhan wajib pajak, serta mengurangi angka kebocoran pajak yang dikarenakan oleh tarif pajak itu sendiri. Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa perubahan UU PPh tersebut bertujuan untuk menyempurnakan berbagai kekurangan UU PPh sebelumnya.

Perubahan UU PPh di Indonesia tahun 2008 yang diaktifkan sejak tahun 2009 tidak hanya mengenai tarif progresif saja, akan tetapi juga penetapan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Akan tetapi, perubahan perpajakan khususnya pada UU PPh memberikan dampak pada pertumbuhan penerimaan pajak itu sendiri seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 1.1 di bawah ini. Penurunan drastis penerimaan PPh migas dan non migas terjadi pada saat UU PPh yang baru mulai diaktifkan yaitu pada tahun 2009.



Gambar 1.1 Penerimaan total pajak, PPh migas dan nonmigas

Pada dasarnya, kebijakan penurunan tarif di Indonesia mengacu pada banyaknya penelitian di berbagai negara bahwa penurunan tarif pajak mampu mengurangi angka penggelapan dan penghindaran pajak, sehingga dengan menurunkan tarif pajak justru dapat menaikkan penerimaan pemerintah (pádurean, stoian dan cãmpeanu, 2011).

Penurunan tarif pajak juga dapat menstimulus menaikkan perekonomian di suatu negara karena beban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berkurang sehingga pendapatan yang dapat dibelanjakan (*disposable income*) masyarakat bertambah, dengan demikian daya beli masyarakat juga akan bertambah yang dalam skala nasional akan meningkatkan PDB, (wanniski, 1978).

Perubahan UU PPh dalam Sari (2010) sebenarnya bertujuan untuk :

1. menaikkan penerimaan pajak yang diakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak dan menstimulus iklim usaha,
2. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak,
3. meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat yang bertujuan untuk menarik investor, serta mendorong pengembangan ekonomi lemah dan menengah,
4. menyesuaikan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Hani dan Daoed (2013) di KPP Medan Barat tentang perubahan tarif PPh terutama Badan menunjukkan bahwa pemotongan tarif PPh Badan hanya meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar untuk memperoleh NPWP, akan tetapi tidak diiringi dengan angka kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak di KPP tersebut. Dari penelitian tersebut, jika kita merujuk kembali pada apa yang dapat Gambar 1.1 sampaikan bahwa perubahan tarif justru menurunkan angka pertumbuhan penerimaan pajak sehingga implikasi dari penerapan UU PPh tahun 2008 masih jauh dari tujuan utamanya.

Di Jawa Timur, peningkatan penerimaan PPh Orang pribadi (OP) tiap tahunnya masih terbilang kurang signifikan meskipun pemerintah pusat telah melakukan perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh. Hal ini dapat dimungkinkan karena banyak hal seperti penggelapan dan pengelakan pajak, serta penerapan sistem perpajakan yang masih belum maksimal. Jawa timur menjadi obyek penelitian ini dengan menggunakan data dari Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur III.

Direktorat jendral pajak (DJP) Jawa Timur dibagi menjadi tiga kantor wilayah (kanwil) yang memiliki tugas sebagai pengawas KPP (Kantor Pajak Pratama) di beberapa kabupaten dan kota di Jawa timur. Studi pada penelitian ini menggunakan DJP kanwil jatim III yang berlokasi di kota Malang dan mengawasi 15 KPP yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota. Dalam penelitian ini hanya meneliti 14 KPP di 10 Kabupaten/kota karena pertimbangan sebaran data.

Tabel 1.3 Penerimaan PPh OP di 10 Kabupaten/kota di Jawa Timur (juta rupiah)

Kab/Kota	2011	2012	2013
Kediri	10.659,14	15.783,50	9.692,16
Pasuruan	5.971,11	12.925,94	15.410,83
Probolinggo	9.263,36	7.190,67	6.058,87
Jember	6.068,67	6.673,80	6.844,59
Banyuwangi	4.160,37	5.041,17	5.569,38
Tulungagung	6.843,28	6.434,21	7.765,16
Blitar	2.657,60	7.154,53	17.469,17
Situbondo	2.412,92	2.711,00	2.920,62
Malang	25.336,19	28.059,69	30.550,42
Batu	933,70	1,138,84	1,223,48

Sumber : DJP Kanwil Jatim III Malang.

Peningkatan penerimaan PPh OP di 10 kabupaten/kota tersebut belum signifikan karena perbaikan dan penerapan sistem perpajakan masih belum maksimal sehingga masih banyak wajib pajak yang masih belum terdaftar di KPP (Rahmany, 2013). Selain permasalahan sistem, pemotongan tarif PPh yang belum dapat memaksimalkan penerimaan PPh terjadi karena adanya potensi penerimaan pajak yang hilang, namun hal tersebut dapat berangsur pulih dan akhirnya tarif pajak yang lebih rendah akan mampu meningkatkan penerimaan negara (Malcomson, 1986).

1.2 Rumusan Masalah

Pada dasarnya, pemotongan tarif pajak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan dan melunasi kewajibannya setiap tahun sehingga penerimaan pemerintah dari sektor pajak akan meningkat sehingga ruang fiskal akan semakin terbuka. Pemotongan tarif pajak juga dapat mendorong konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian suatu negara yang ditunjukkan oleh meningkatnya PDB negara tersebut. Akan tetapi, penerapan kebijakan tersebut tidak selalu selaras dengan kenyataan yang terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh tarif PPh Orang Pribadi terhadap penerimaan PPh di Indonesia selama tahun 2011-2013 dari sudut pandang teori kurva Laffer dengan menggunakan analisis regresi data panel. Analisis regresi pada data panel memiliki banyak metode pendekatan dan dalam penelitian ini sehingga ada dua rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu;

1. Model apa yang terbaik untuk melihat pengaruh perubahan tarif PPh OP terhadap penerimaan PPh orang pribadi?
2. Bagaimana pengaruh perubahan tarif PPh OP terhadap penerimaan PPh orang pribadi berdasarkan hasil dari model terbaik?
3. Apakah tarif PPh OP saat ini merupakan tarif PPh yang dapat memaksimalkan penerimaan pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki dua tujuan , yaitu:

1. Untuk mengetahui model terbaik yang dapat menggambarkan pengaruh tarif terhadap penerimaan PPh OP.
2. Untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif terhadap penerimaan PPh OP.
3. Untuk mengetahui tarif PPh OP yang dapat memaksimalkan penerimaan pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan mengenai dampak perubahan tarif terhadap penerimaan PPh OP diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi peneliti dan Universitas Jember, tetapi juga bagi pembaca dan beberapa pihak yang berhubungan langsung dengan perpajakan.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan sumber referensi tentang kebijakan tarif pajak dan teori Kurva Laffer untuk penelitian selanjutnya.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembuktian mengenai paradigma Kurva Laffer di Indonesia, Khususnya Jawa Timur.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian dapat menyumbang ide bagi kebijakan sistem perpajakan di masa mendatang, terutama yang berkaitan tentang tarif pajak dan penerimaannya.
 - b. Tarif pajak untuk memaksimalkan penerimaan pemerintah sebagai hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan sebagai gambaran tentang keadaan perpajakan di Indonesia.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

Tinjauan teoritis ini membahas mengenai teori yang menunjang penelitian ini yaitu teori kurva Laffer, kajian empiris yang telah dilakukan mengenai perubahan tarif pajak pada penerimaan pemerintah, kerangka konseptual yang menjadi alur penelitian dan hipotesis yang berisi dugaan hasil penelitian.

2.1.1 Pajak

Sistem perekonomian dengan tiga dan empat sektor memiliki sektor penyeimbang antara rumah tangga konsumen dan produsen serta sektor luar negeri yaitu sektor pemerintah. Dalam sistem ini, pemerintah sebagai penyeimbang perekonomian memiliki kebijakan fiskal sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi semaksimal mungkin agar sektor lainnya mendapatkan kesejahteraan. Salah satu instrumen kebijakan fiskal adalah pajak yang dibebankan pada berbagai aspek perekonomian termasuk salah satunya yaitu penghasilan.

Pajak dalam artian sederhana adalah suatu pungutan yang diakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terhadap wajib pajak yang diatur oleh undang-undang tanpa harus memberikan imbalan langsung (Rahayu, 2010:223). Pungutan tersebut pada digunakan oleh pemerintah untuk membiayai sebagian besar kegiatan pemerintah yang tertuang dalam laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada akhirnya, kegiatan pemerintah yang mempengaruhi besaran pengeluaran negara akan mempengaruhi perekonomian nasional.

1. Fungsi dan prinsip keadilan dari sistem perpajakan

Sebagai salah satu instrument kebijakan fiskal, pajak memiliki dua fungsi utama dalam perekonomian makro, yaitu (Resmi, 2016:3);

a. Fungsi anggaran.

Sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak berfungsi untuk membiayai belanja negara seperti belanja wajib, dan untuk pembiayaan pembangunan yang pada akhirnya bertujuan untuk perbaikan ekonomi di suatu negara. Penerimaan pajak yang besar akan mampu memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah, begitu juga sebaliknya. Dalam hal ini, maka setiap kebijakan yang mampu mempengaruhi penerimaan pajak juga akan mempengaruhi anggaran pemerintah.

b. Fungsi pengatur (regulator).

Pajak sebagai salah satu instrument kebijakan fiskal berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah. Contohnya pemerintah dapat menurunkan tarif pajak dalam rangka menarik investor.

Kebijakan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus juga memiliki prinsip keadilan meskipun pajak memiliki banyak fungsi yang mampu membantu pemerintah dalam berbagai kegiatan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat. Prinsip keadilan menitikberatkan pada kemampuan sistem perpajakan untuk memberikan rasa keadilan bagi setiap lapisan masyarakat di suatu negara. Prinsip keadilan yang harus dimiliki oleh pajak ada dua yaitu prinsip manfaat dan kemampuan membayar (Mankiw, 2001:327).

Prinsip keadilan yang pertama yaitu manfaat. Suatu sistem perpajakan dikatakan adil jika beban pajak yang harus dikeluarkan oleh masyarakat sesuai atau seimbang dengan balas jasa yang diterima dari pemerintah. Sistem perpajakan tidak hanya berfokus dalam kebijakan tarif dan layanan perpajakan akan tetapi juga harus melibatkan kebijakan anggaran pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak. Hal ini sangat terkait dengan fungsi sektor pemerintah sebagai penyeimbang dalam suatu sistem perekonomian. Prinsip keadilan yang kedua yaitu kemampuan wajib pajak untuk membayar. Terlepas dari kebijakan anggaran pemerintah, prinsip ini menjelaskan bahwa tarif yang dibebankan harus sesuai dengan kemampuan wajib

pajak tersebut, sehingga tidak ada masyarakat yang merasa terbebani dengan adanya tarif pajak. Dari kedua prinsip tersebut, pada umumnya tarif yang dibebankan oleh pemerintah lebih mengacu pada prinsip kemampuan wajib pajak untuk membayar tarif pajak (Mankiw, 2001:327).

Pajak sebagai instrument kebijakan fiskal yang dimiliki oleh pemerintah dalam suatu sistem perekonomian memiliki berbagai pengaruh bagi sektor konsumen, produsen, dan sektor luar negeri sesuai dengan obyek yang dikenai pajak. Misalnya pajak pertambahan nilai akan mempengaruhi kurva ekuilibrium suatu barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen, pajak penghasilan akan mempengaruhi produsen dan konsumen. Pajak penghasilan akan mempengaruhi fungsi konsumsi pada sektor konsumen dan mempengaruhi biaya produksi pada produsen (Mankiw, 2001:156). Dalam penelitian ini, pembatasan masalah perpajakan yaitu pajak penghasilan yang diteliti merupakan pajak sebagai sumber dari anggaran pendapatan dan belanja pemerintah serta pajak yang mengacu pada prinsip kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak.

2. Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak pendapatan adalah jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Tarif pajak ditetapkan oleh negara berdasarkan penggolongan jumlah pendapatan yang diterima selama setahun. Pada dasarnya, ada tiga model tarif pajak, yaitu (Case dan Fair, 2007:450);

1. Tarif pajak progresif adalah tarif yang dibebankan pada wajib pajak dengan berbagai lapisan pendapatan, dan tarif tersebut semakin meningkat semakin bertambah besarnya pendapatan wajib pajak.
2. Tarif pajak degresif adalah tarif pajak yang berkebalikan dengan tarif pajak progresif, sehingga tarif pajak yang dibebankan akan semakin rendah seiring dengan pendapatan wajib pajak yang semakin besar.
3. Tarif pajak proporsional adalah tarif pajak tunggal yang dibebankan pada wajib pajak. Contohnya adalah PPh Badan Indonesia saat ini, yaitu 25%.

2.1.2 Pajak penghasilan di Indonesia

Sumber pendapatan pemerintah Indonesia menurut susunan APBN dibedakan menjadi tiga, yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak dan penerimaan hibah. Dari ketiga sumber tersebut, penerimaan perpajakan menyumbang lebih dari 50% pendapatan pemerintah. Penerimaan perpajakan berasal dari berbagai macam kegiatan ekonomi nasional yang dibebankan tarif tertentu di bawah peraturan undang-undang perpajakan. Penerimaan pajak terbesar adalah pajak penghasilan yang diatur oleh UU PPh di Indonesia.

UU PPh di Indonesia pertama kali disahkan pada tahun 1984, dan telah beberapa kali mengalami perubahan baik subyek pajak, obyek pajak, maupun besaran tarif yang harus dibayar oleh masyarakat. UU PPh telah diubah sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1991, 1994, 2000 dan terakhir pada tahun 2008. Perubahan ini merupakan suatu keharusan untuk mengikuti perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang selalu mengalami perubahan karena perkembangan zaman. Pada sub bab ini, akan dibahas secara umum mengenai definisi tentang PPh dan juga perbedaan antara UU PPh tahun 2000 dan UU PPh tahun 2008 khususnya yang berkenaan dengan PPh Orang Pribadi (OP).

1. Definisi pajak penghasilan menurut UU PPh No 36/2008

Menurut UU PPh No. 36/2008 pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan yang diterima atau diperoleh subyek atau wajib pajak dalam tahun pajak. Subyek pajak yang dimaksud dalam UU tersebut adalah orang pribadi, warisan (yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak), badan, dan bentuk usaha tetap.

Obyek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biayadan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

2. Perbedaan UU PPh No 17/2000 dengan UU PPh No 36/2008

UU PPh No 36/2008 telah diaktifkan penerapannya pada Januari 2009. UU PPh tersebut merupakan salah satu langkah dari reformasi perpajakan di Indonesia guna meningkatkan penerimaan pajak tetapi tanpa menekan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Secara sederhana, tarif pajak dapat membebani laju pertumbuhan karena timbulnya biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh produsen maupun konsumen sehingga dapat mempengaruhi berbagai ekuilibrium ekonomi.

Perbedaan nyata yang terdapat diantara kedua UU PPh tersebut adalah perubahan beban tarif yang harus dibayarkan wajib pajak (WP) orang pribadi dan

badan. Selain itu, perubahan beberapa ayat dalam UU PPh No 36/2008 yang bertujuan untuk mengurangi keambiguan dalam UU PPh sebelumnya serta beberapa penyesuaian yang berhubungan dengan perubahan sosial masyarakat serta perkembangan teknologi. Untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini, maka pembahasan mengenai perbedaan UU PPh tersebut hanya pada wilayah PPh OP.

Pasal yang membahas tentang PPh OP tertuang dalam pasal 21 dan pasal 25/29. Secara garis besar pasal 21 membahas mengenai pelunasan beban pajak WPOP yang dilakukan oleh pemberi kerja (perusahaan, instansi pemerintahan dan lain sebagainya) dengan cara pemotongan gaji maupun upah. Sedangkan pasal 25/29 membahas tentang pembayaran beban pajak yang dilakukan secara mandiri oleh WPOP. Perbedaan antara UU PPh No 17/2000 dengan UU PPh No 36/2008 secara garis besar yaitu:

- a. Tarif progresif UU PPh No 36/2008 relatif lebih rendah daripada tarif progresif UU PPh No. 17/2000. Besaran tarif progresif telah disinggung dalam bab 1.
- b. Perbedaan tarif antara WPOP yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan WPOP yang tidak memiliki NPWP. WPOP yang tidak memiliki NPWP akan dibebani tarif pajak 20% lebih tinggi dari pada WPOP yang telah memiliki dan dapat menunjukkan NPWP. Perbedaan tarif ini tidak dimiliki oleh PPh No. 17/2000.
- c. Bagian penghasilan yang digunakan untuk membayar badan usaha atas jasa keuangan (seperti Bank dan BPR) tidak termasuk penghasilan kena pajak. Ketentuan ini merupakan bagian dari UU PPh No 36/2008 yang tidak tertuang dalam UU PPh No 17/2000.
- d. Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berbeda di antara kedua UU PPh tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan terbaru yaitu Nomor 122 tahun 2015 PTKP bagi diri WPOP sebesar Rp 36.000.000,00 dan jika WPOP berstatus kawin maka ditambah Rp 3.000.000,00 dan tanggungan maksimal dalam keluarga adalah tiga orang yang masing-masing sebesar Rp 3000.000,00. Jika seorang istri memiliki penghasilan maka PTKP keluarga tersebut bertambah

menjadi Rp 36.000.000 sehingga jika satu keluarga lima orang (sepasang suami istri yang memiliki pekerjaan masing-masing dan tiga anak) maka PTKP keluarga tersebut sebesar Rp 84.000.000,00.

2.1.3 Teori Kurva Laffer

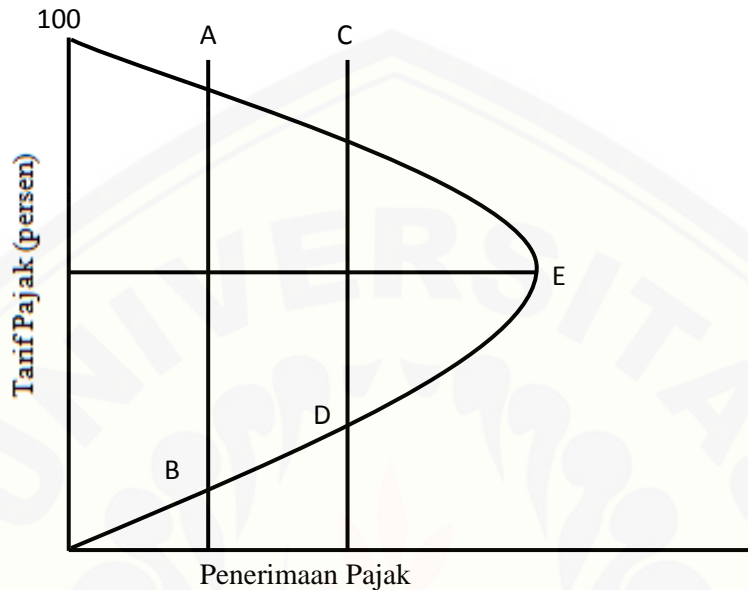
Kurva Laffer diperkenalkan pertama kali oleh Arthur B. Laffer pada saat acara makan malam bersama Jude Wanniski, Dick Cheney, dan Donald Rumsfeld di sebuah restaurant pada tahun 1974 (Hasset 2006). Sebenarnya konsep tentang hubungan tarif terhadap penerimaan pajak yang menguatkan teori kurva Laffer telah ada jauh sebelum Kurva Laffer itu sendiri.

Pada abad ke-14, seorang filsuf muslim Ibnu Khaldun menulis bahwa pada awal dinasti, pajak menghasilkan penerimaan besar dari penarikan yang kecil, dan pada akhir dinasti, pajak menghasilkan penerimaan yang kecil dari penarikan yang besar. John Maynard Keynes juga mengatakan bahwa penarikan pajak dengan tarif tinggi dapat mengakibatkan produsen meningkatkan biaya produksinya yang berimbas pada kenaikan harga *output*-nya sehingga pada akhirnya menyebabkan lemahnya sisi penawaran (Laffer, 2004).

Menurut Laffer, ada dua efek dari penurunan tarif pajak, yaitu efek aritmatika dan efek ekonomi. Efek aritmatika akan menjelaskan bahwa turunnya tarif pajak juga akan diikuti oleh turunnya penerimaan pajak itu sendiri sesuai dengan proporsinya. Sedangkan fungsi ekonomi menekankan bahwa turunnya tarif pajak juga akan diikuti dengan meningkatnya produktifitas dan juga jumlah tenaga kerja sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi.

Seperti pada gambar 2.1, kurva tersebut menggambarkan hubungan antara tarif pajak dan penerimaannya dimana ada dua titik tarif pajak yang dapat menghasilkan penerimaan pajak dengan jumlah yang sama. Lekukan kurva dari titik 0 sampai E disebut area normal dan dari titik E sampai dengan titik 100 disebut dengan area terlarang (*prohibitive range*). Dikatakan Area terlarang karena jika tarif pajak lebih

besar daripada titik E dapat mengakibatkan lumpuhnya kegiatan ekonomi serta lesunya transaksi antara konsumen dan produsen (Fullerton, 1980).



Gambar 2.1 Kurva Laffer (Wanniski, 1978)

Selalu ada dua level tarif pajak yang menghasilkan penerimaan pajak yang sama, di mana pada saat tarif pajak berada di kedua titik ekstrim (0 dan 100), penerimaan pajak sama dengan nol. Pada titik ekstrim 0%, penerimaan pemerintah dari pajak adalah nol, karena tidak ada masyarakat yang terbebani oleh pajak. Titik ekstrim kedua yaitu 100% dimana pada titik ini, berapa pun pendapatan masyarakat yang diperoleh dari bekerja akan diserahkan semuanya kepada pemerintah, dengan demikian masyarakat tidak akan termotivasi untuk bekerja atau menaikkan pendapatan karena berapapun pendapatan yang mereka terima akan habis untuk membayar pajak. Penerimaan yang sama juga diperoleh pada saat tarif pajak berada di titik A dan B, begitu pula dengan titik C dan D. Penerimaan pajak maksimum diperoleh pada titik E seperti yang terlihat pada kurva Laffer di atas (Wanniski, 1978).

Lebih detail lagi dipandang dari efek ekonomi, pajak memiliki dua efek terhadap perilaku individu (Kohn, 1997):

1. Efek pendapatan ; meningkatkan tarif pajak pendapatan akan mengakibatkan *disposable income* berkurang, sehingga daya beli masyarakat pun menurun. Tentu saja penurunan daya beli masyarakat ini akan mempengaruhi konsumsi nasional pada suatu Negara.
2. Efek Substitusi ; efek ini membuat harga suatu barang atau jasa naik, sehingga konsumen akan beralih menggunakan barang atau jasa substitusional dari barang dan jasa yang tarif pajaknya dinaikan.

Pada analisis dinamis, kedua efek ekonomis dari perubahan tarif tersebut secara bertahap akan mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara. Laffer menekankan bahwa penerimaan pajak yang merespon perubahan pada tarif pajak tergantung pada sistem perpajakan, periode waktu, kemudahan untuk berpindah ke aktifitas *underground* (ilegal), tingkat pajak yang ada, pemalsuan laporan akuntansi, serta angka penggelapan pajak.

Menurut Agell dan Persson (2000), tarif pajak akan mempengaruhi pendapatan masyarakat dan selanjutnya akan mempengaruhi rumah tangga konsumsi. Jika tarif pajak ditingkatkan maka *disposable income* individu akan turun sesuai dengan besaran tarif pajak yang dibebankan. Sedangkan pada penerimaan pemerintah, jika diasumsikan ceteris paribus dan hanya pajak yang mempengaruhi penerimaan pemerintah maka penerimaan pemerintah akan naik seiring dengan tarif yang naik. Akan tetapi konsumsi masyarakat dan investasi akan melemah meskipun *transfer payment* dan pengeluaran pemerintah bertambah sehingga akan mengalami perlambatan pertumbuhan pendapatan nasional.

2.2 Tinjauan Empiris

Penelitian tentang dampak tarif terhadap penerimaan pajak telah dilakukan di berbagai negara. Fullerton (1980) pertama kali meneliti dampak tarif pajak terhadap pendapatan negara di Amerika Serikat. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa

tarif pajak pendapatan orang pribadi di AS berada pada area terlarang. Berbeda dengan Fullerton, Hsing (1996) yang meneliti menggunakan data tahunan 1959-1991 menyatakan bahwa tarif pajak AS masih menuju ke arah titik maksimum. Dengan demikian, jika AS menurunkan tarif pajaknya maka penerimaan pajak juga akan turun.

Agell dan Persson (2000) yang menggunakan analisis dinamis berkesimpulan bahwa variabel yang paling berpengaruh adalah transfer pemerintah yang diperoleh dari pajak lah yang paling berpengaruh bukan tarif pajak itu sendiri. Sedangkan Karas (2012) menggunakan metode regresi polinomial, mendapatkan hasil bahwa tarif pajak pendapatan berpengaruh signifikan terhadap total penerimaan pajak setiap tahunnya.

Heijman dan Ophem (2005) serta Trandafir dan Brezeanu (2011) berkesimpulan bahwa tarif pajak mempengaruhi perilaku wajib pajak yang berkaitan pada penghindaran pajak sehingga pada saat tarif pajak yang ada dinaikan melebihi kemampuan masyarakat, maka akan ada dampak “*multiplier effect*” yang berimbas pada penurunan pendapatan negara. Seluruh penelitian tersebut mengacu pada satu kesimpulan, yaitu perubahan tarif pajak akan mempengaruhi perilaku wajib pajak sehingga pada akhirnya akan berdampak pada penerimaan pemerintah. Dalam analisa *time series*, ketika tarif pajak dinaikan akan berdampak pada penurunan penerimaan pemerintah selama kenaikan tarif pajak tersebut melebihi kemampuan respon masyarakat.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

Peneliti/ Tahun	Judul	Metode Analisis	Hasil
Fullerton (1980)	Can Tax Revenue Go Up When Tax Rates Go Down?	OLS single equation technique	Tarif pajak pendapatan di AS harus diturunkan karena tarif pajak berada di <i>prohibitive area</i>

Hsing (1996)	Estimating The Laffer Curve And Policy Implications	Linier log-log polynomial regression	Hsing menggunakan tarif pajak rata-rata sebagai variabel bebas, dan menyimpulkan bahwa masih ada cukup ruang bagi pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak dengan menaikkan tarif pajak.
Agell dan Persson (2000)	On The Analytics of The Dynamic Laffer Curve	AK Model	Konsep efek kurva laffer tidak dapat berdiri sendiri, karena pada dasarnya tarif pajak dengan sedemikian rupa mempengaruhi <i>transfer payment</i> yang pada akhirnya mempengaruhi penerimaan pajak.
Heijman dan Ophem (2005)	Willingness to Pay Tax The Laffer Curve Revisited For 12 OECD Countries	OLS	Tarif pajak yang tidak sesuai akan mendorong naiknya biaya, turunnya produktifitas, turunnya pendapatan, dan pada akhirnya menurunkan penerimaan pajak.
Trandafir dan Brezeanu (2011)	Optimal of Fiscal Policy in Romania in Terms of Laffer Curve	OLS	Perekonomian Romania berada pada <i>prohibitive area</i> selama periode 200-1010. Pajak mengekang kegiatan ekonomi sehingga menurunkan basis pajak.

Karas (2012)	Tax Rate to Maximize The Revenue : Laffer Curve for The Czech Republic	Log Polynomial Regression	Ada korelasi antara tarif pajak dan penerimaan pajak. pada kenyataannya, optimalisasi tarif pajak dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kesadaran wajib pajak, hubungan mereka dengan sektor hitam (lihat heijman dan Ophem, 2005), efisiensi audit pajak, motif pembuat kebijakan tarif, serta keefektifan penarikan pajak.
---------------------	--	---------------------------	---

Model penelitian ini mengadaptasi penelitian yang dilakukan oleh Hsing (1996) dan Karas (2012) yang memproksikan variabel tarif pajak. Hsing menyarankan banyak cara untuk menghitung tarif pajak, seperti persentasi dari penerimaan pajak/PDB, realisasi pengeluaran pemerintah/PDB, persentasi penerimaan pajak/pendapatan perkapita. Karas menggunakan alat analisis regresi polinomial derajat kedua untuk mencari tarif yang dapat memaksimalkan penerimaan pajak.

Perbedaan model pada penelitian ini dan model pada penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah lokasi penelitian yang memilih Indonesia karena terjadi beberapa kali perubahan tarif pada UU PPh, dan penambahan rentang waktu dalam penelitian ini bertujuan agar dapat meminimalisir kesalahan estimasi dalam pengujian yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Perbedaan selanjutnya adalah sampel yang digunakan merupakan sampel dengan data panel (*pooled*). Tarif PPh OP dalam penelitian ini menggunakan rasio antara penerimaan PPh OP rata-rata terhadap pendapatan per kapita selama setahun.

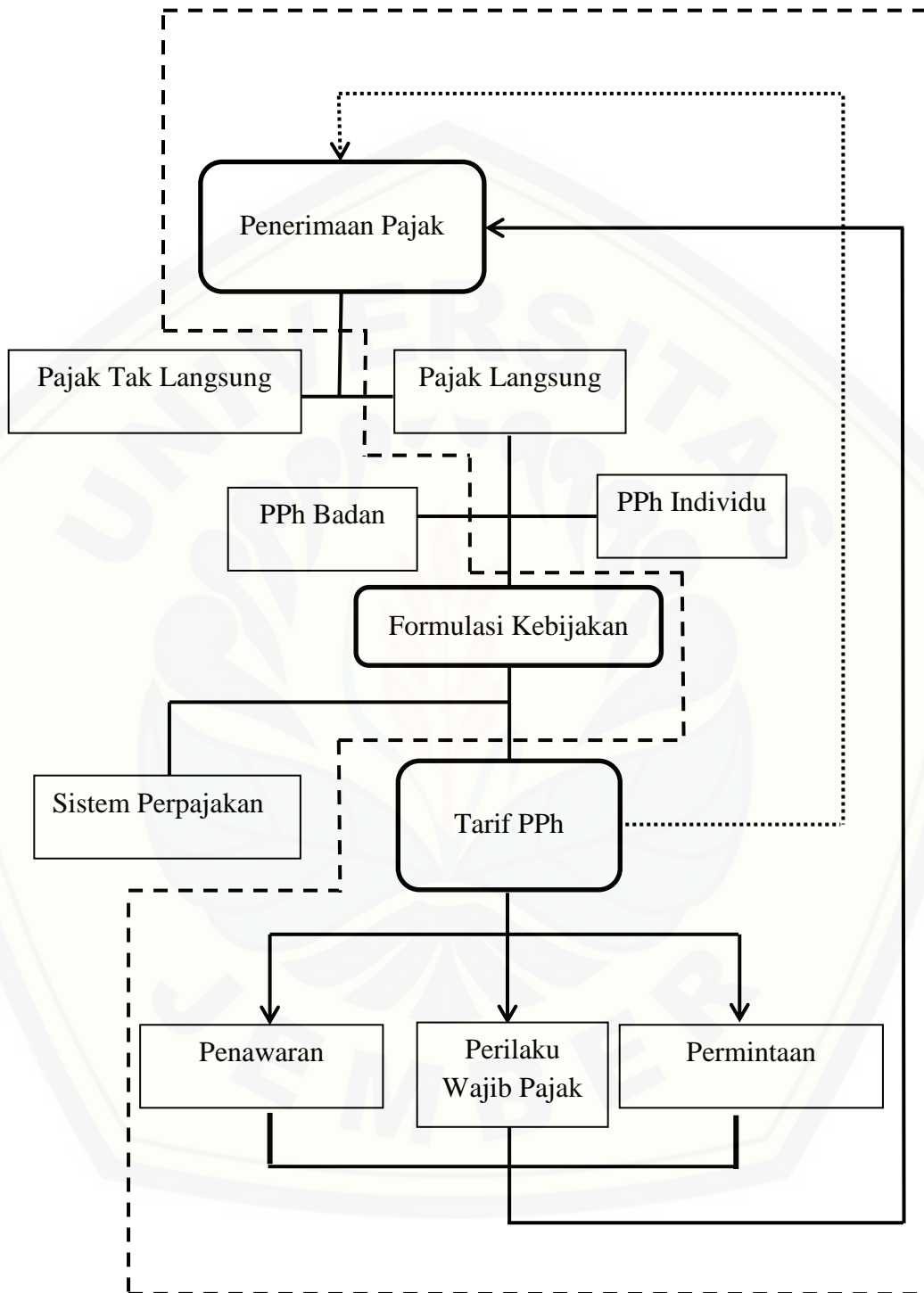
2.3 Kerangka Konseptual

kerangka koseptual digunakan sebagai pedoman atas alur pemikiran dalam fokus penelitian yang menunjukkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian seperti yang ditampilkan gambar 2.2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

sejauh mana tarif PPh mempengaruhi pendapatan negara dan bagaimanakah formulasi kebijakan tarif PPh yang tepat bagi Indonesia. Aamir *et al.* (2011) menggolongkan PPh badan dan individu termasuk dalam pajak langsung karena wajib pajak tidak mengalihkan kewajibannya kepada oranglain. Pada teori kurva Laffer, Laffer (2004) sendiri menekankan bahwa pemotongan tarif tidak selalu diikuti oleh kenaikan penerimaan pajak, akan tetapi kenaikan penerimaan pajak tergantung pada perilaku wajib pajak sebagai respon dari tarif pajak, sistem perpajakan, serta kemudahan untuk memasuki kegiatan tak kena pajak (*underground activities*). Jika tarif pajak dimasa lalu terlalu tinggi (*prohibitive area*), maka pemotongan pajak dimasa kini akan menaikkan penerimaan pajak dimasa depan. Dengan demikian maka tarif pajak dan sistem perpajakanlah yang paling mempengaruhi penerimaan pajak.

Agell dan Persson (2000) membagi wajib pajak menjadi dua sektor, yaitu rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Pembagian itu dilakukan karena perbedaan respon yang ditimbulkan dari perubahan tarif pajak itu sendiri. Dalam model perekonomian tiga sektor, tarif pajak akan mempengaruhi penghasilan dan kekayaan serta kurva permintaan sektor konsumsi, dan tarif pajak akan mempengaruhi biaya serta kurva penawaran sektor produksi. Pada akhirnya, tarif pajak tersebut akan berpengaruh pada perilaku wajib pajak sebagai respon dari perubahan tarif pajak.

Setelah tarif pajak mempengaruhi rumah tangga produksi dan konsumsi, ada sektor tak kena pajak yang termasuk juga di dalamnya adalah *underground activities*. Kaitannya adalah, rumah tangga produksi atau konsumsi akan memasuki area *underground activities* sebagai akibat dari tarif pajak dan kemudahan untuk memasuki area tersebut (Heijman dan Ophem, 2005). *Underground activities* dikategorikan dalam perilaku wajib pajak karena berhubungan dengan perilaku wajib pajak untuk memasuki atau keluar dari wilayah tersebut setelah perubahan tarif pajak.



Gambar 2.2 Kerangka konseptual

Dari seluruh penjelasan di atas, dan mengacu pada asumsi dasar Laffer, maka diperoleh kesimpulan bahwa perubahan penerimaan pajak dipengaruhi oleh reaksi berantai atau *multiplier effect* yang ditimbulkan dari perubahan tarif pajak dan sistem perpajakan. Penelitian ini lebih berkonsentrasi kepada perubahan tarif pajak sehingga sistem perpajakan tidak digunakan dalam variabel bebas, dengan alasan tarif pajak merupakan pengaruh utama dalam kegiatan ekonomi sektor produksi dan konsumsi di Indonesia.

2.4 Hipotesis

Mengacu pada teori kurva Laffer dan model regresi polinomial pada penelitian terdahulu di mana model yang terbaik adalah model yang dapat menghasilkan kurva melengkung dengan titik maksimum maka hipotesis dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Model terbaik adalah model semi logaritma natural,
2. Tarif PPh orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan PPh orang pribadi,
3. Tarif PPh orang pribadi yang diberlakukan saat ini adalah tarif yang dapat memaksimalkan penerimaan PPh orang pribadi.

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

Bab 3 menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini mulai dari data, objek, hingga metode analisis dalam menjawab pertanyaan empiris yang telah dijelaskan sebelumnya.

3.1 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data gabungan (*panel data*) dari rentan waktu (*time series*) dan cross-section dengan menggunakan data tahunan mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2014 dengan obyek penelitian adalah seluruh kabupaten yang berada dalam DJP Kanwil Jatim III. Alasan utama dalam pemilihan jenis data gabungan (*panel data*), yaitu tidak ada sumber data rentang waktu yang memadai karena terjadi reformasi perpajakan di Indonesia sehingga penggabungan data rentang waktu dengan data panel dibutuhkan untuk menambah jumlah sampel penelitian.

Penggabungan data selain dapat menambah jumlah observasi, juga memiliki lima keuntungan lainnya (Gujarati, 2004 : 637) yaitu:

1. Mengakomodir tingkat heterogenitas masing-masing individu yang tidak dimasukkan dalam model.
2. Menunjukkan data yang lebih informatif, mengurangi kolinearitas antar variabel, lebih banyak derajat kebebasan (*degree of freedom*) dan lebih efisien.
3. Dengan mempelajari kembali *cross-section* dari observasi, data panel lebih cocok untuk mempelajari dinamika perubahan data.
4. Mampu mendeteksi dan mengukur efek variabel bebas lebih baik.
5. Data panel memungkinkan untuk mempelajari perilaku model yang lebih kompleks.

Pada akhirnya, penggabungan data tersebut diharapkan dapat meminimalisir kesalahan estimasi dan dapat memenuhi asumsi BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*). Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari Direktorat Jendral Pajak Jatim III Malang, dan kantor BPS Jember.

3.2 Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan analisis deskriptif untuk menganalisa pengaruh tarif terhadap penerimaan PPh dengan menggunakan model regresi polinomial. Pengolahan data panel dapat menggunakan banyak variasi estimasi regresi dikarenakan sifat data yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Dalam penelitian ini, analisis regresi polinomial menggunakan tiga bentuk model yang berbeda dan akan diuji dengan Hausman tes, Chow tes, dan LM tes untuk membantu peneliti menemukan model terbaik.

Model regresi polinomial derajat kedua dipilih karena mengacu pada teori kurva laffer yang mengatakan bahwa terdapat satu titik tarif yang mampu memaksimalkan penerimaan pajak, dan jika tarif pajak yang telah dinaikan belum melampaui titik maksimumnya maka penerimaan pajak akan bertambah, dan sebaliknya jika tarif pajak dinaikan melampaui titik maksimum maka penerimaan pajak akan menurun seperti yang ditunjukkan titik E pada gambar 2.1. Menurut Gujarati (2004), hubungan antara tarif dan penerimaan pajak yang menghasilkan kurva melengkung dan menggunakan data panel dapat dianalisis menggunakan pendekatan OLS (*Ordinary Least Square*), FEM (*Fixed Effect Model*), REM (*Random Effect Model*).

Restriksi dalam penelitian ini adalah titik balik kurva yang dihasilkan oleh model terbaik harus sesuai dengan teori kurva Laffer. Titik balik kurva yang dihasilkan oleh suatu model polinomial memiliki dua kemungkinan yaitu titik balik minimum dan maksimum. Dalam teori kurva Laffer, titik balik kurva harus dapat menunjukkan titik maksimum, sehingga model terbaik dalam penelitian ini harus dapat memiliki titik balik maksimum agar sesuai dengan teori kurva Laffer. Pada penelitian

ini, model regresi yang digunakan adalah semi logaritma agar dapat menghasilkan titik balik maksimum.

3.2.1. Analisis Data

Analisis regresi merupakan alat analisis yang digunakan untuk memperoleh arah dan besarnya hubungan dari satu variabel terikat dengan satu atau beberapa variabel bebas yang mempengaruhinya (Gujarati, 2004:4). Analisis regresi dalam penelitian ini menggunakan tiga model pendekatan yang sering digunakan untuk mempelajari data panel.

Spesifikasi model pada penelitian ini mengadopsi model pada penelitian yang dilakukan oleh Karas (2012) dengan menggunakan regresi polinomial. Pemilihan variabel bebas mengadopsi pada penelitian Hsing (1996) yang akan dibahas pada definisi operasional.

1. Model pendekatan OLS

Analisis regresi dengan pendekatan OLS pada data panel sering juga disebut *pooled regression*. Pendekatan OLS merupakan cara paling sederhana untuk menganalisa data panel dengan mengabaikan dimensi ruang dan waktu (Gujarati, 2004:636). Dengan demikian, pemakaian OLS akan mengaburkan karakteristik sebenarnya dari masing-masing kabupaten yang diteliti.

$$\text{LnTxR}_{it} = f(Ir, Ir^2) \quad (3.1.1)$$

Model tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam model ekonometrika, sehingga :

$$\text{LnTxR}_{it} = \beta_1 + \beta_2 Ir_{it} + \beta_3 Ir_{it}^2 + u_{it} \quad (3.1.2)$$

Di mana :

LnTxR : Penerimaan PPh orang pribadi

LnIr	: Tarif rata-rata PPh orang pribadi
t	: Waktu
i	: <i>cross-section</i> data
u	: Variabel error
$\beta_{1,2,3}$: parameter

2. Pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM)

$$\text{LnTxR}_{it} = \beta_{1i} + \beta_2 \text{Ir}_{it} + \beta_3 \text{Ir}_{it}^2 + u_{it} \quad (3.1.3)$$

Perbedaan model FEM dan model OLS terdapat pada konstanta atau intersep. Pada model FEM, intersep bervariasi untuk setiap kabupaten/kota. Hal yang perlu ditekankan adalah meskipun intersep tiap kabupaten berbeda, akan tetapi intersep tiap kabupaten tidak berubah tiap waktu (Gujarati, 2004:642).

3. Pendekatan *Random Effect Model* (REM)

Model ini mengkombinasikan pengaruh ruang dan waktu tiap obyek penelitian dengan cara memperlakukan variabel error dan intersep pada model 3.1.3.

$$\text{LnTxR}_{it} = \beta_{1i} + \beta_2 \text{Ir}_{it} + \beta_3 \text{Ir}_{it}^2 + u_{it} \quad (3.1.4)$$

Dengan mengasumsikan nilai intersep tiap kabupaten menjadi

$$\beta_{1i} = \beta_1 + \varepsilon_i \quad i = 1, 2, \dots, N \quad (3.1.5)$$

Nilai β_{1i} pada REM tidak lagi sama seperti pada FEM, dimana ε merupakan *random error term* dengan sebuah nilai rata-rata dari nol dan varian dari σ_ε^2 , dan nilai β_1 adalah nilai intersep rata-rata dari seluruh populasi yang sebenarnya. Penambahan ε_i digunakan agar setiap individu memiliki intersep yang berbeda (Gujarati, 2004:647). Penggabungan 3.1.4 dan 3.1.5 akan menghasilkan *Random Effect Model* sebagai berikut :

$$\ln TxR_{it} = \beta_1 + \beta_2 Ir_{it} + \beta_3 Ir_{it}^2 + \omega_t \quad (3.1.6)$$

Dimana $\omega_t = u_{it} + \varepsilon_i$

Kesimpulan dari perbedaan antara model FE (*Fixed effect*) dan model RE (*Random effect*) tersebut adalah pada model FE, setiap unit *cross-section* memiliki nilai intersepnya sendiri. Pada model RE, intersep β_1 adalah nilai rata-rata dari keseluruhan nilai intersep *cross-section* dan *error component* (ε_i) melambangkan nilai deviasi pada intersep masing-masing individu dari nilai intersep rata-rata tersebut (Gujarati, 2004:648).

4. *Tax rate for maximum revenue* (tarif pajak untuk penerimaan maksimum)

Penghitungan tarif untuk penerimaan maksimum PPh orang pribadi dilakukan setelah menemukan pendekatan terbaik dari ketiga model diatas yaitu (Karas, 2012):

$$Ir = \left(-\frac{\beta_2}{2\beta_3} \right)$$

Uji kelayakan model dalam penelitian ini menggunakan uji Chow, Hausman dan lagrange multiplier digunakan guna melihat hasil estimasi model yang terbaik yang mampu menggambarkan keadaan data dari kriteria pengujian. Uji statistik biasa (yang terdiri dari pengujian koefisien determinasi berganda, pengujian secara simultan pada keseluruhan variabel bebas dan secara parsial pada masing-masing variabel bebas).

5. Uji kelayakan model

Penelitian ini menggunakan tiga kali pengujian di mana setiap pengujian yang dilakukan akan mampu menunjukan satu model terbaik diantara ketiga model yang diajukan.

- A. Uji Chow digunakan untuk menentukan model terbaik antara model OLS dan FEM. Apabila nilai probabilitas < taraf signifikansi 5% maka FEM lebih baik daripada OLS, dan sebaliknya (Baltagi dalam Pangestika, 2015).
- B. Uji Hausman digunakan untuk menentukan model terbaik antara FEM dan REM. Apabila nilai probabilitas < taraf signifikansi 5% maka FEM lebih baik daripada REM, dan sebaliknya (Gujarati, 2004:650).
- C. Uji lagrange multiplier dengan menggunakan nilai probabilitas Breusch-Pagan dilakukan untuk menentukan model terbaik antara model OLS dan REM. Apabila 5% lebih dari nilai probabilitas maka REM lebih baik daripada model OLS, dan sebaliknya (Rosadi dalam Pangestika, 2015).

6. Uji F (Uji Simultan)

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(n-k)}$$

Keterangan :

F : pengujian secara simultan

R^2 : koefisien determinan berganda

k : jumlah variabel

n : jumlah observasi

Rumusan Hipotesis :

1. $H_0 : a_1 = a_2 = a_3 = 0$, artinya variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara serentak.
2. $H_0 : a_1 \neq a_2 \neq a_3 \neq 0$, artinya variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara serentak

Kriteria pengujian :

- 1) Jika probabilitas F hitung $\leq \alpha$ ($\alpha=5\%$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- 2) Jika probabilitas F hitung $\geq \alpha$ ($\alpha=5\%$), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

7. Uji-t (Uji Parsial)

$$t = \frac{\beta_1}{S\beta_1}$$

Keterangan :

t : pengujian secara parsial

β_1 : koefisien regresi linier berganda

$S\beta_1$: standar error

Rumusan Hipotesis :

1. $H_0 = \beta_1 = 0$, artinya variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara parsial.
2. $H_0 \neq \beta_1 \neq 0$, artinya variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara parsial.

Kriteria pengujian :

- 1) Jika probabilitas t hitung $\leq \alpha$ ($\alpha = 5\%$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- 2) Jika probabilitas t hitung $\geq \alpha$ ($\alpha = 5\%$), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

8. Koefisien determinasi berganda (R^2)

Pengujian R^2 digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat ditinjau dari hasil uji koefisien determinasi R^2 . Nilai R^2 terletak antara 0-1 ($0 < R^2 < 1$).

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

Keterangan :

R^2 = koefisien determinan

ESS = jumlah kuadrat yang dijelaskan

TSS = jumlah kuadrat total

Kriteria pengujian:

1. Jika nilai R^2 hampir mendekati 1, maka terdapat hubungan korelasi yang erat antara variabel bebas dengan variabel terikat.
2. Jika nilai R^2 mendekati 0, maka tidak terdapat hubungan korelasi yang erat antara variabel bebas dengan variabel terikat.

3.2.2. Uji Asumsi Klasik

Asumsi dasar klasik BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) dapat terpenuhi jika model yang telah diestimasi OLS lulus dari uji asumsi klasik. Sifat-sifat yaitu :

1. *Linear*. Sifat ini dibutuh untuk memudahkan perhitungan dalam penaksiran.
2. *Unbiasedness*. Sifat ini dibutuhkan pada sampel yang sangat besar, penaksiran parameter diperoleh dari sampel besar yang nilainya mendekati nilai parameter yang sesungguhnya.
3. *Best*. Sifat varian terkecil secara sendiri tidak dibutuhkan, karena suatu taksiran memiliki varian nol, namun memiliki penyimpangan yang besar (*enormous bias*). Sifat varian minimum dibutuhkan apabila dikombinasikan dengan sifat tidak bias. Pentingnya sifat ini dapat dilihat bila diterapkan dalam uji signifikansi baku terhadap α dan β serta membuat interval keyakinan taksiran-taksiran.

Uji asumsi klasik meliputi linieritas, normalitas, multikolinearitas, otokorelasi dan heteroskedastisitas. Akan tetapi, jika model terbaik adalah REM maka pengujian otokorelasi dan heteroskedastisitas tidak perlu dilakukan karena pada dasarnya REM merupakan alat analisis dengan pendekatan *Generalized Least Square* (GLS). GLS digunakan sebagai pendekatan alternatif untuk menyembuhkan masalah otokorelasi dan heteroskedastisitas yang mungkin dapat terjadi pada model OLS (Wooldridge, 2003: 263; Matyas L & Sevestre, 1996:8).

a. Uji Linieritas

Uji Linieritas digunakan untuk menguji linieritas model dan pengujian yang sering digunakan adalah uji *Ramsey Reset*. Untuk melakukan uji tersebut harus menggunakan asumsi di mana fungsi adalah fungsi linier dan langkah-langkah yang diterapkan dalam uji reset diantaranya adalah.

1. Melakukan regresi dengan persamaan ($Y_t = f(X_{1t}, X_{2t})$) untuk memperoleh nilai yang pas (*fitted*) dari variabel terikat.
2. Melakukan regresi dengan memasukan nilai *fitted* sebagai variabel tambahan pada variabel terikat.
3. Mencari nilai R^2 baru, kemudian dilakukan perhitungan untuk mencari nilai uji F.

b. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengevaluasi nilai residual dari model yang yang dibentuk telah normal atau tidak. Pendekatan pengujian normalitas menggunakan pendekatan *Jarque-Berra Test*.

1. Bila nilai JB hitung $>$ nilai X^2 tabel atau nilai probabilitas JB hitung $>$ nilai probabilitas ($\alpha=10\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual dalam berdistribusi normal ditolak.
2. Bila nilai JB hitung $<$ nilai X^2 tabel atau nilai probabilitas JB hitung $<$ nilai probabilitas ($\alpha=10\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual dalam berdistribusi normal diterima.

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji keterkaitan antar variabel bebas dalam model. Multikolinieritas diperkenalkan oleh Ragnar Frisch pada tahun 1934 yang menyebutkan bahwa suatu regresi dapat dikatakan mengalami multikolinieritas apabila terdapat hubungan linier yang sempurna antar variabel bebas dari suatu

model. Secara spesifik, suatu model dikatakan terjangkit multikolinearitas jika nilai r^2 antar variabel bebas lebih besar daripada nilai R^2 dalam model. Analisis regresi polinomial sangat rentan terjangkit multikolinearitas karena variabel bebas kedua merupakan nilai kuadrat dari variabel bebas pertama. Dalam kasus ini, multikolinearitas diperbolehkan selama nilai standar *error* kecil dan mendekati nol (Hsing, 1996).

d. Uji Otokorelasi

Otokorelasi merupakan alat yang digunakan pada suatu model untuk menguji ada atau tidak ada hubungan antara variabel eror pada masing-masing tahun. Penyebab timbulnya otokorelasi antara lain yaitu:

1. Adanya kelembaman seperti data pendapatan nasional, indeks harga konsumen, data produksi yang menunjukkan adanya pola konjungtur. Dalam situasi tersebut, data sekarang kemungkinan dipengaruhi oleh data pada periode sebelumnya.
2. *Bias Spesification*, kasus variabel yang tidak dimasukkan menurut teori ekonomi adalah penting dalam menjelaskan variabel terikat, sehingga unsur variabel eror akan merefleksikan suatu pola yang sistematis diantara unsur pengganggu.
3. Data manipulatif

Uji yang digunakan untuk mendeteksi terjadinya otokorelasi adalah uji Durbin-Watson. Model ini dapat dikatakan bebas dari otokorelasi apabila nilai Durbin-Watson memenuhi syarat $du < d < 4 - du$.

e. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji kesalahan pengganggu memiliki varian yang konstan atau tidak. Dalam ekonometrika, heteroskedastisitas diartikan sebagai situasi di mana nilai varian dari faktor pengganggu adalah tidak

sama untuk semua observasi. Masalah heteroskedastisitas biasanya ditemukan pada data lintas sektoral. Heteroskedastisitas dapat dideteksi menggunakan uji *White*, di mana uji ini diperkenalkan oleh H. White. Kriteria pengujian ini yaitu:

1. Nilai X^2 hitung ($\text{Obs} \cdot R\text{-squared}$) > nilai X^2 tabel ($\text{Obs} \cdot R\text{-squared}$) atau nilai probabilitas X^2 hitung < nilai probabilitas ($\alpha=10\%$), maka terjadi adanya heteroskedastisitas.
2. Nilai X^2 hitung ($\text{Obs} \cdot R\text{-squared}$) < nilai X^2 tabel ($\text{Obs} \cdot R\text{-squared}$) atau nilai probabilitas X^2 hitung > nilai probabilitas ($\alpha=10\%$), maka tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.

3.3 Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel yang dijelaskan bertujuan untuk memfokuskan penelitian dan menghindari permasalahan yang meluas. Variabel yang diteliti pada penelitian ini yaitu :

1. Variabel LnTxR adalah penerimaan rata-rata PPh orang pribadi per tahun dalam rupiah yang diperoleh dari hasil pembagian penerimaan total PPh OP dengan WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) aktif. Data diperoleh dari DJP Kanwil Jatim III Malang.

$$\text{LnTxR} = \text{Ln} \left(\frac{\text{PPhOP}}{\text{WPOP}} \right)$$

2. Variabel Ir adalah tarif rata-rata PPh OP yang diperoleh dari rasio TxR dengan pendapatan perkapita setahun yang mengacu pada Hsing (1996) dan Karas (2012). Data diperoleh dari BPS dan DJP Kanwil Jatim III Malang.

$$\text{Ir} = \left(\frac{\text{TxR}}{\text{PDRBkapita}} \right)$$

3. Variabel Ir^2 adalah nilai pangkat dua dari variabel Ir yang menjadi identitas regresi polinomial derajat kedua dalam penelitian ini.



BAB 5. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerimaan pemerintah dari perpajakan merupakan penerimaan terbesar dari pada sumber penerimaan lainnya. Oleh karena itu, maka kebijakan mengenai perpajakan yang diatur oleh undang-undang akan sangat mempengaruhi penerimaan pemerintah pada tahun selanjutnya.

Fenomena perubahan tarif pajak menjadi hal yang sangat populer dan banyak diperbincangkan di seluruh dunia. Penelitian mengenai efektifitas pengaruh pemotongan tarif terhadap penerimaan suatu negara telah banyak dilakukan. Angell dan Persson (2000), Heijman dan Ophem (2005) Trandafir dan Brezeanu (2011) serta Karas (2012) meneliti pengaruh tarif pajak tersebut dengan berbagai hasil yang berbeda-beda.

Teori mengenai pengaruh tarif terhadap penerimaan pajak dipopulerkan oleh Laffer yang kemudian terkenal dengan sebutan teori kurva Laffer. Teori tersebut mengatakan bahwa pada dasarnya, kurva korelasi antara tarif dan penerimaan pajak berbentuk melengkung dan ada titik di mana tarif mampu memaksimalkan penerimaan pemerintah.

Penelitian ini merupakan penelitian yang berdasar pada teori kurva Laffer dengan menggunakan sampel 10 kabupaten di provinsi Jawa Timur, Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat tiga kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Model terbaik yang dapat memenuhi asumsi teori kurva Laffer adalah model regresi polinomial semi logaritma natural pada variabel terikatnya dengan melibatkan efek *random* (acak) pada intersep dan *error term*.
2. Tarif PPh memiliki pengaruh yang positif dan kemudian pada titik maksimum, jika pemerintah menaikkan tarif maka akan terjadi penurunan penerimaan pemerintah dari pajak penghasilan orang pribadi.

3. Mengacu pada teori kurva Laffer, tarif rata-rata di seluruh kabupaten/kota di wilayah penelitian ini berada pada area normal sehingga pemerintah dapat memaksimalkan penerimaan PPh OP melalui tarif yang lebih tinggi.

B. Saran

Peneliti memiliki beberapa saran bagi pemerintah dan wajib pajak di Indonesia berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

1. Pemotongan tarif PPh OP yang telah dilakukan oleh pemerintah memiliki dua dampak yaitu kepada penerimaan pemerintah dan konsumsi masyarakat. Pemerintah tidak perlu lagi memangkas tarif pajak pada masa mendatang karena dengan pemotongan tarif ini pertumbuhan ekonomi dapat meningkat sebagai akibat dari bertambahnya pendapatan yang dapat dibelanjakan (*disposable income*). Pembenahan sistem perpajakan lebih ditekankan kepada peningkatan pelayanan di kantor pajak dan penyuluhan yang berkesinambungan kepada masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal sangat perlu dipertimbangkan adalah tarif rata-rata yang harus selalu dipantau jika terjadi kenaikan penerimaan PPh OP di masa mendatang.
2. Bagi masyarakat, khususnya wajib pajak. Pelunasan beban pajak harus dibayar setiap tahun agar penerimaan pemerintah dapat meningkat. Meningkatnya penerimaan pemerintah akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan nasional melalui pengeluaran pemerintah (*government expenditure*).
3. Bagi akademisi, khususnya peneliti yang akan melakukan pengembangan penelitian terkait dengan tarif dan penerimaan pajak dengan pendekatan teori yang sama, perlu dilakukan penelitian dampak tarif terhadap penerimaan pajak dalam ruang lingkup yang lebih luas dan kurun waktu yang lebih panjang sehingga hasil penelitian dapat lebih bermanfaat di masa mendatang.

DAFTAS PUSTAKA

- Aamir, Qayyum, Nasir, Hussain, Khan, dan Butt. 2011. "Determinant of Tax Revenue: A Comparative Study of Direct Taxes and Indirect Taxes of Pakistan and India". *International Journal of Business and Social Science*, 2 (19): 173-178.
- Agell, J., Persson, M. 2000. "On The Analythics of The Dynamic Laffer Curve". *Seminar Paper of Institute for International Economics Studies Stockholm*, 682.
- Becsi, Zsolt. "The Shifty Laffer Curve". *Federal Reserve Bank of Atlanta : Economic Review*. Q3, 2000.
- Case, K. E. & Fair, R. C. 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Jilid 1*. Terjemahan oleh: Y. Andri Zaimur. Jakarta: Erlangga
- Fullerton, Don. 1980. "Can Tax Revenues Go Up When Tax Rates Go Down?". *OTA Paper*, 41.
- Gujarati, Damodar N. 2004. *Basic Econometric (4th Edition)*. Columbus : Mcgraw-Hill, Inc.
- Hani, S., dan Daoed, H. R. 2013. "Analisis Penurunan Tarif PPh Badan dalam Meningkatkan Penerimaan PPh di KPP Medan Barat". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 13(1): 55-79.
- Hartini. 2009. "Analisis Manfaat Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi PPh Pasal 21 dan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Tahun 2009 Bagi Wajib Pajak." Tidak Diterbitkan. Tesis. Semarang : Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Hassett, Kevin A. "Art Laffer, Righter Than Ever". *National Review/February*. 13, Hal.6, 2006.
- Heijman, W. J. M., dan Ophem, J. A. C. V. 2005. "Willingness to Pay Tax: The Laffer Curve Revisited for 12 OECD Countries". *The Journal of Socio-Economics*, 34: 714-723.
- Henderson, David. 1981. "Limitations Of The Laffer Curve As A Justification For Tax Cuts". *Cato Journal*, 1 : 45-52.

- Hsing, Y. 1996. "Estimating The Laffer Curve and The Policy Implication". *Journal of Socio-Economics*, 25(3): 395-401.
- Ivanova, Anna., Keen, Michael dan Klemm, Alexander. 2005. "The Russian Flat Tax Reform". *Economic Policy*, 20(43) : 398-444.
- Kalchev, Emil. 2014. "The Bulgarian Flat Tax". *Economic Alternatives*. Issue 1 : 33-41.
- Karas, M.2012. "Tax rate to maximize the revenue: Laffer curve for the Czech Republic". *Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun*, 60(4): 189–194.
- Kohn, Meir. 1997. "Macro Economics", Ohio : south-western college publishing.
- Laffer, A. B. 1981. "Government Exactions And Revenue Deficiencies". *Cato Journal*, 1: 1–21.
- Laffer, A. B., 2004: "The Laffer Curve: Past, Present, And Future". www.heritage.Org/research/reports/2004/06/thelaffer-curve-past-present-and-future. [23 Desember 2014].
- Malcomsom, J. M. 1986. "Some Analytics of The Laffer Curve". *Journal of Public Economics*, 29: 263-279.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Pengantar Ekonomi*. Terjemahan oleh : Haris Munandar & Wisnu Chandra Kristiaji. Jakarta : Erlangga.
- Matyas L. & Sevestre, Patrick (eds.). 1996. *The Econometrics of Panel Data. A Handbook of the Theory with Applications, Second Revised Edition*. Dordrecht: Kluwer.
- Mangkoesebroto, Guritno, 1998. *Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia : Substansi dan Urgensi*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Pădurean, Elena., Stoian, Andreea., dan Câmpeanu, Emilia. 2011. "Laffer Taxation Rate : Estimation for Romania's Case". *Analele Stiintifice ale Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi - Stiinte Economice*, 2011 (SE): 183-189.
- Pangestika, Styfanda. 2015."Analisis Estimasi Model Regresi Data Panel dengan Pendekatan *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM, dan *Random Effect Model* (REM). Tidak Diterbitkan. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Rahayu, A. S. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.

- Schiller, B. R. 2005. *Essential of Economics*. Columbus : Mcgraw-Hill,Inc
- Sari, E. D. K. 2010. “Pengaruh Reformasi Pajak 2008 Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI”.Skripsi.Semarang : Universitas Diponegoro.
- Trandafir, A., dan Brezeanu, P. 2011. “Optimality of Fiscal Policy in Romania in Terms of Laffer Curve”. *Theoretical and Applied Economics*, 17 (8): 53-60.
- Wanniski, Jude.1978. “Taxes Revenues And The Laffer Curve”. *National Affair*. 50 : 3-16.
- Wooldridge, J. M. 2002. *Introductory Econometrics: A Modern Approach 2E*. Ohio: Thomson South-Western.
- Fatimah, Euis. 2011. “Persandingan Susunan dalam Satu Naskah UU PPh”. Direktorat Jendral Pajak. Jakarta: Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas.



LAMPIRAN

Lampiran A. Tabulasi Data

Kab/Kota	Tahun	PDRB Perkapita 1 tahun	Penerimaan PPh Rata-rata 1 tahun	Tarif PPh Rata-rata
Kediri	2011	46.494.255,28	2.123.499,00	0,28344
	2012	52.712.364,87	2.356.272,00	0,31300
	2013	62.384.363,40	1.978.911,00	0,17595
Pasuruan	2011	12.014.541,22	183.849,40	0,76511
	2012	13.464.012,53	356.290,70	1,32312
	2013	15.135.783,39	366.995,70	1,21234
Probolinggo	2011	17.014.216,30	236.465,40	0,69490
	2012	18.508.468,93	151.492,70	0,40925
	2013	21.671.329,02	111.715,30	0,25774
Jember	2011	12.088.027,08	183.337,20	0,75834
	2012	13.617.696,63	186.097,80	0,68329
	2013	14.253.032,57	167.523,80	0,58767
Banyuwangi	2011	17.145.383,00	194.674,40	0,56771
	2012	19.875.546,41	209.528,50	0,52710
	2013	21.449.459,56	192.949,40	0,44977
kota batu	2011	19.199.565,31	151.624,10	0,39486
	2012	21.489.414,97	163.415,80	0,38022
	2013	24.606.445,82	152.619,10	0,31012
Tulungagung	2011	18.402.344,93	199.154,30	0,54111
	2012	20.590.947,63	168.111,00	0,40821
	2013	21.793.533,97	184.938,80	0,42429
Situbondo	2011	14.226.246,25	103.652,70	0,36430
	2012	15.984.422,92	103.055,60	0,32236
	2013	17.527.579,16	103.435,00	0,29506
Malang	2011	14.456.716,35	1.491.653,00	0,91726
	2012	16.389.966,36	1.499.842,00	0,78701
	2013	19.285.106,54	1.349.821,00	0,65763
Blitar	2011	12.793.800,55	111.748,80	0,43673
	2012	14.217.318,39	263.819,40	0,92780
	2013	15.185.560,79	582.964,40	1,91946

Lampiran B. Data Variabel Penelitian

Kabupaten/kota	Tahun	LTXR	IR	IR2
Kediri	2011	14,56858	4,567229	20,85958
	2012	14,67259	4,470055	19,9814
	2013	14,49806	3,172127	10,06239
Pasuruan	2011	12,12187	1,530224	2,341587
	2012	12,7835	2,646244	7,002609
	2013	12,81311	2,424689	5,879118
Probolinggo	2011	12,37356	1,389811	1,931574
	2012	11,92829	0,818505	0,66995
	2013	11,62371	0,515498	0,265738
Jember	2011	12,11908	1,516685	2,300332
	2012	12,13403	1,366588	1,867562
	2013	12,02888	1,175356	1,381461
Banyuwangi	2011	12,17908	1,135433	1,289209
	2012	12,25262	1,054202	1,111343
	2013	12,17018	0,899553	0,809196
Kota Batu	2011	11,92916	0,789727	0,623668
	2012	12,00405	0,760448	0,578281
	2013	11,9357	0,62024	0,384698
Tulungagung	2011	12,20184	1,082223	1,171206
	2012	12,03238	0,816431	0,66656
	2013	12,12778	0,848595	0,720113
Situbondo	2011	11,5488	0,728602	0,530861
	2012	11,54302	0,644725	0,41567
	2013	11,5467	0,590127	0,34825
Malang	2011	14,2154	10,31806	106,4624
	2012	14,22087	9,150974	83,74033
	2013	14,11548	6,999293	48,9901
Blitar	2011	11,62401	0,87346	0,762933
	2012	12,48302	1,85562	3,443325
	2013	13,27588	3,838939	14,73745

Lampiran C. Hasil Analisis Deskriptif

	LNTXR	IR	IR2
Mean	12.56904	2.286655	11.37763
Median	12.15211	1.155394	1.335335
Maximum	14.67259	10.31806	106.4624
Minimum	11.54302	0.515498	0.265738
Std. Dev.	1.000062	2.522075	25.01021
Skewness	1.079816	2.008962	2.847255
Kurtosis	2.712455	6.181059	10.15803
Jarque-Bera	5.933369	32.82856	104.5810
Probability	0.051474	0.000000	0.000000
Sum	377.0712	68.59966	341.3288
Sum Sq. Dev.	29.00360	184.4651	18139.81
Observations	30	30	30

Lampiran D. Hasil Estimasi OLS (*Pooled Regression*)

Dependent Variable: LNTXR

Method: Panel Least Squares

Date: 03/13/16 Time: 10:16

Sample: 2011 2013

Periods included: 3

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.11745	0.130442	85.22893	0.0000
IR	0.965797	0.093903	10.28507	0.0000
IR2	-0.066522	0.009469	-7.024946	0.0000
R-squared	0.891579	Mean dependent var		12.56904
Adjusted R-squared	0.883548	S.D. dependent var		1.000062
S.E. of regression	0.341272	Akaike info criterion		0.782364
Sum squared resid	3.144592	Schwarz criterion		0.922484
Log likelihood	-8.735457	Hannan-Quinn criter.		0.827189
F-statistic	111.0149	Durbin-Watson stat		0.322591
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran E. Hasil Estimasi FEM

Dependent Variable: LNTXR
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 03/13/16 Time: 18:31
 Sample: 2011 2013
 Included observations: 3
 Cross-sections included: 10
 Total pool (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.42704	0.101354	112.7441	0.0000
IR	0.698388	0.063802	10.94611	0.0000
IR2	-0.039988	0.005254	-7.610353	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_KEDIRI--C	0.988911			
_PASURUAN--C	-0.188017			
_PROBOLINGGO--C	-0.047726			
_JEMBER--C	-0.203904			
_BANYUWANGI--C	0.097223			
_BATU--C	0.045152			
_TULUNGAGUNG--C	0.088173			
_SITUBONDO--C	-0.320689			
_MALANG--C	-0.216555			
_BLITAR--C	-0.242569			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.991739	Mean dependent var	12.56904
Adjusted R-squared	0.986690	S.D. dependent var	1.000062
S.E. of regression	0.115374	Akaike info criterion	-1.192095
Sum squared resid	0.239602	Schwarz criterion	-0.631616
Log likelihood	29.88142	Hannan-Quinn criter.	-1.012793
F-statistic	196.4436	Durbin-Watson stat	1.951568
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran F. Hasil Estimasi REM

Dependent Variable: LNTXR?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 03/13/16 Time: 18:35

Sample: 2011 2013

Included observations: 3

Cross-sections included: 10

Total pool (balanced) observations: 30

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.38290	0.135477	84.02077	0.0000
IR	0.731323	0.057580	12.70100	0.0000
IR2	-0.042728	0.005068	-8.430376	0.0000
Random Effects (Cross)				
_KEDIRI--C	0.908122			
_PASURUAN--C	-0.194445			
_PROBOLINGGO--C	-0.029655			
_JEMBER--C	-0.191381			
_BANYUWANGI--C	0.106011			
_BATU--C	0.064262			
_TULUNGAGUNG--C	0.100353			
_SITUBONDO--C	-0.285189			
_MALANG--C	-0.234852			
_BLITAR--C	-0.243226			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.328327	0.8901
Idiosyncratic random			0.115374	0.1099
Weighted Statistics				
R-squared	0.873882	Mean dependent var		2.499113
Adjusted R-squared	0.864540	S.D. dependent var		0.325535
S.E. of regression	0.119813	Sum squared resid		0.387587
F-statistic	93.54297	Durbin-Watson stat		1.241022
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				

R-squared	0.865904	Mean dependent var	12.56904
Sum squared resid	3.889279	Durbin-Watson stat	0.123674



Lampiran G. Hasil Uji Chow (OLS Vs FEM)

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: SEMILN

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	24.248414	(9,18)	0.0000
Cross-section Chi-square	77.233752	9	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: LNTXR

Method: Panel Least Squares

Date: 03/13/16 Time: 18:36

Sample: 2011 2013

Periods included: 3

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.11745	0.130442	85.22893	0.0000
IR	0.965797	0.093903	10.28507	0.0000
IR2	-0.066522	0.009469	-7.024946	0.0000

R-squared	0.891579	Mean dependent var	12.56904
Adjusted R-squared	0.883548	S.D. dependent var	1.000062
S.E. of regression	0.341272	Akaike info criterion	0.782364
Sum squared resid	3.144592	Schwarz criterion	0.922484
Log likelihood	-8.735457	Hannan-Quinn criter.	0.827189
F-statistic	111.0149	Durbin-Watson stat	0.322591
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran H. Hasil Uji Hausman (FEM Vs REM)

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: ALL

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.117243	2	0.1276

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
IR?	0.698388	0.731323	0.000755	0.2308
IR2?	-0.039988	-0.042728	0.000002	0.0480

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LNTXR?

Method: Panel Least Squares

Date: 03/13/16 Time: 18:37

Sample: 2011 2013

Included observations: 3

Cross-sections included: 10

Total pool (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.42704	0.101354	112.7441	0.0000
IR?	0.698388	0.063802	10.94611	0.0000
IR2?	-0.039988	0.005254	-7.610353	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.991739	Mean dependent var	12.56904
Adjusted R-squared	0.986690	S.D. dependent var	1.000062
S.E. of regression	0.115374	Akaike info criterion	-1.192095
Sum squared resid	0.239602	Schwarz criterion	-0.631616

Log likelihood	29.88142	Hannan-Quinn criter.	-1.012793
F-statistic	196.4436	Durbin-Watson stat	1.951568
Prob(F-statistic)	0.000000		



Lampiran I. Hasil Uji Breusch-Pagan Lagrange Multiplier (OLS Vs REM)

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

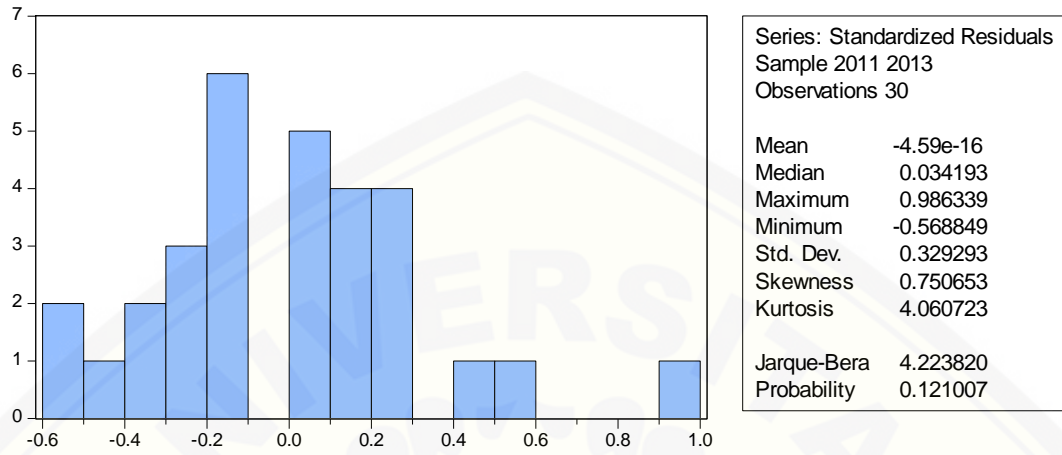
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	15.68902 (0.0001)	1.592694 (0.2069)	17.28172 (0.0000)
Honda	3.960937 (0.0000)	-1.262020 --	1.908423 (0.0282)
King-Wu	3.960937 (0.0000)	-1.262020 --	0.547410 (0.2920)
Standardized Honda	4.729912 (0.0000)	-1.043734 --	-0.436225 --
Standardized King-Wu	4.729912 (0.0000)	-1.043734 --	-1.545708 --
Gourierioux, et al.*	--	--	15.68902 (< 0.01)

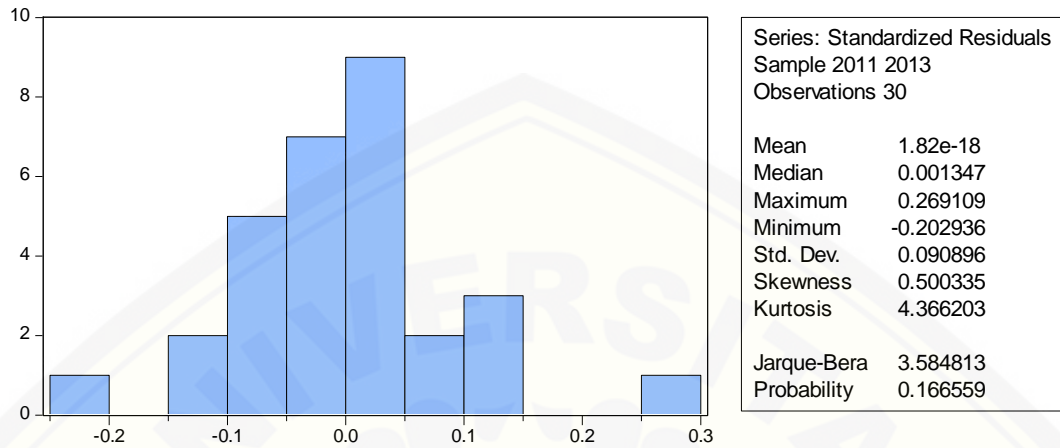
*Mixed chi-square asymptotic critical values:

1%	7.289
5%	4.321
10%	2.952

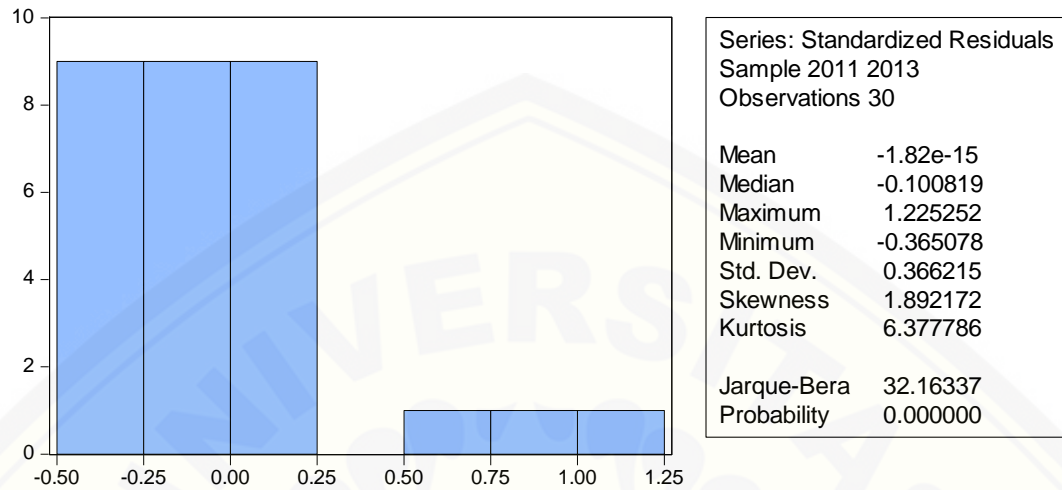
Lampiran J. Uji Normalitas pada Estimasi OLS



Lampiran K. Hasil Uji Normalitas pada Estimasi FEM

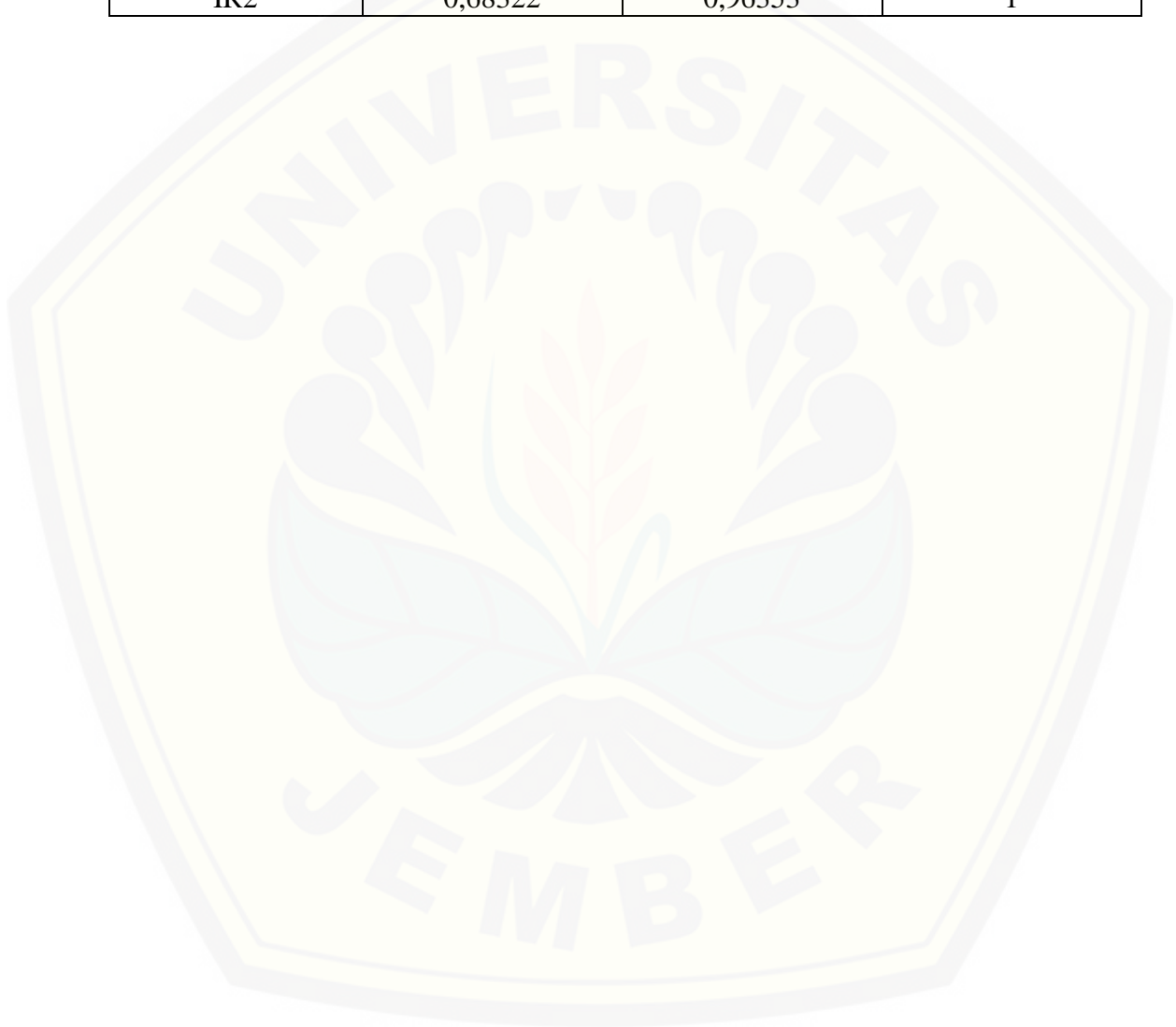


Lampiran L. Hasil Uji Normalitas Estimasi REM



Lampiran M. Hasil Uji Multikolinearitas

	LNTXR	IR	IR2
LNTXR	1	0,83271	0,68322
IR	0,83271	1	0,96353
IR2	0,68322	0,96353	1



Lampiran N. Surat Izin Riset dari DJP Kanwil Jatim III Malang



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III

JALAN LETJEN S. PARMAN No.100MALANGKODE POS 65122
 TELEPON(0341) 403333 , 403461-62; FAKSIMILE(0341) 403463; SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK 1500200
 E-MAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S - 229 /WPJ.12/2016
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Hal : Pemberian Izin Riset
 a.n. Darwis Muhammad Ahrori, NPM 100810101014

26 Januari 2016

Yth. Sekretaris Lembaga Penelitian
 Universitas Jember
 Jl. Kalimantan No.37 Jember

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 49/UN25.3.1/LT/2016 tanggal 13 Januari 2016 hal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian, atas :

Nama / NPM : Darwis Muhammad Ahrori / 100810101014

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk penelitian dan/atau riset pada Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3) Kanwil DJP Jawa Timur III, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *softcopy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Softcopy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Kantor,

Bud. Santanto
 NIP. 197004031995031001

Tembusan :
 Mahasiswa yang bersangkutan.
 Kp.:BD.05/BD.0502